DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

KABUPATEN JAYAPURA

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2024 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor/ Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Kampung, Musrenbang Distrik, Forum SKPD dan Pra Musrenbang Kabupaten.

Dari kegiatan tersebut diatas, tersusunlah pagu anggaran Perangkat Daerah (PD) untuk diajukan ke pemerintah daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura, Rencana Strategis Kementrian Kesehatan serta aspirasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dilengkapi dengan lampiran-lampiran indikator program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan meyelenggarakan fungsi : ” perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ”. Untuk itu diperlukan adanya suatu acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sitematis dapat dipedomani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura secara terarah dan terukur.

1.2. Landasan Hukum

Dalam mewujudkan dan pencapaian sasaran yang akan dicapai, untuk pelaksanaan program dan kegiatan mengacu kepada tugas dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Kesehatan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standard Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;

23. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
24. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Badan Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura pada Bab II Susunan Organisasi Bagian kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 4 ayat 1 dan 2.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja DInas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2024 adalah sebagai arah atau pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, khususnya dalam kurun waktu satu tahun mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Mencermati hubungan Renja Perangkat Daerah (PD) dengan dokumen perencanaan lainnya jelas cukup relavan, sebagaimana dapat diuraikan antara lain :

a. Renja PD mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab Jayapura 2023-2026
b. Penyusunan Renja PD yang menjadi pedoman dan payung hukum adalah RPD daerah dan RPJPD Daerah
c. Renja PD yang telah dirumuskan menjadi kerangka acuan dalam membuat Rencana Kinerja Tahunan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2024 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dilakukan dengan menilai pencapaian indikator kinerja sasaran, sehingga diketahui berapa sasaran yang mencapai target yang ditetapkan dan berapa sasaran yang tidak memenuhi target, bahkan berapa sasaran yang tidak ada pencapaian sama sekali.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja pada sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Dalam rangka mendapatkan pencapaian target sasaran indikator kinerja dikonversikan dengan satuan kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja juga dilakukan pada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan menilai Indikator Input, Proses, Output dan Outcome. Rincian pengukuran dilakukan menggunakan form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dikonversikan dengan indikator kinerja kegiatan tersebut kedalam satuan yang dapat diukur seperti, Dana, SDM, Laporan, paket dan lain sebagainya. Sehingga terdapat beberapa tahapan dalam kerangka pengukuran kinerja yaitu :

1. Penyusunan Rencana Strategis
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Penetapan Kinerja atas rencana kinerja tahunan yang telah disusun.
4. Pengukuran kinerja yang mencakup :
    a. Pengukuran Kinerja Kegiatan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan.
    b. Pengukuran tingkat Pencapaian Kinerja Tahunan, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan

Dalam memperhatikan realiasi program dan kegiatan tahun anggaran 2022 terhadap rencana strategis serta pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel TC.29 (2.1) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Jayapura

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2023)			
												Target Kinerja (n-2)		Realisasi (n-2)		Tingkat Realisasi						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)		Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)	
								Tatget	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Tingkat Realisasi	anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (11/9*100)	14= (12/10*100)	15	16	17=(7+1+15)	18= (8+12+16)	19=(17/6*100)	20= (18/7*100)
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**																
1	**02**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	7	566.600.325														
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen	5	309.110.750	0	0	1	50.643.750	1	50.643.750	100	100	0	-	1	50.643.750	20	16,38
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	116.025.000	0	0									0	-	-	0,00
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	137.636.900	0	0	5	22.548.900	5	22.548.900	100	100	0	-	5	22.548.900	20	16,38
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	119.852.675	0	0	2	44.656.675	2	44.656.675	100	100	0	-	2	44.656.675	40	37,26
1	**02**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**311.031.630.938**														
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44.880	307.791.776.938	0	0	7200	52.008.685.063	7200	56.120.675.436	100	108	6255	1.618.986.092	13455	57.739.661.528	30	18,76
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	3.239.854.000	0	0	18	536.300.000	18	535.399.500	100	100	0	133.439.000	18	668.838.500	360	20,64
1	**02**	**01**	**2,03**		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Laporan	4	120.000.000														
1	**02**	**01**	**2,03**	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	120.000.000	0	0			0	0			0	0	0	-	-	0,00
1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	1.502.947.000														
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket											1	112.500.000	1	112.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	76.576.000	0	0			0	0			0	0	0	-	-	0,00
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	76.576.000	0	0			0	0			0	0	0	-	-	0,00
1	02	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	orang		-	0	0			0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	20	104.711.000	0	0			0	0			0	0	0	-	-	0,00
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	200	862.572.000	0	0	40	141.321.000	40	141.320.799	100	100	0	-	40	141.320.799	20	16,38
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	480	382.512.000	0	-	15	62.655.000	15	62.654.970	100	100	0	-	15	62.654.970	3	16,38

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2023)			
												Target Kinerja (n-1)		Realisasi (n-1)		Tingkat Realisasi						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)	
										Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Tingkat Realisasi	anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1					2	3	4	Tatget	Anggaran	6	7	8	9	10	11	12= (10/8*100)	13= (11/9*100)	14	15	16=(6+10+14)	17= (7+11+15)	18=(16/6*100)	19= (17/7*100)
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Umum Perangkat Daerah	%	100	1.866.468.729														
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	23.205.000	0	0							-	-	0	-	-	0,00
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	5	91.577.200	0	0	15	15.000.700	15	15.000.700	100	100	0	-	15	15.000.700	300	16,38
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	5	679.802.600	0	0							0	-	0	-	-	0,00
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	5	199.076.429	0	0	13000	134.170.000	13000	134.170.000	100	100	0	-	13000	134.170.000	260.000	67,40
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5	18.315.300	0	0	52100	31.908.400	52100	31.908.080	100	100	1	1.703.000	52101	33.611.080	1.042.020	183,51
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Dokumen	5	213.123.800	0	0	12	3.000.000	12	3.000.000	100	100	0	-	12	3.000.000	240	1,41
1	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1.071.171.000	0	0	11	34.909.400	11	34.891.600	100	100	0	-	11	34.891.600	220	3,26
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	250.000.000	0	0	10	296.223.000	10	293.560.360	100	99	0	41.980.806	10	335.541.166	1.000	134,22
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Unit	10														#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	20	205.000.000	0	0			0	0			0	0	0	-	-	0,00
1	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unt											0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	50	350.000.000	0	0			0	0			0	46.946.065	0	46.946.065	-	13,41
1	02	01	2,08		Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	Laporan	3	268.164.197														
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2.592.347	0	0	4	425.000	4	-	100	0	0	-	4	-	80	0,00
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	5	219.783.600	0	0	12	23.400.000	12	12.415.808	100	53	1	1.257.250	13	13.673.058	260	6,22
1	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	45.788.250	0	0	11	7.500.000	11	7.500.000	100	100	0	-	11	7.500.000	220	16,38
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.797.470.311														
1	02	01	2,09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	34	1.278.390.311	0	0	48	262.610.000	48	234.640.100	100	89	0	-	48	234.640.100	141	18,35
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	132	324.870.000	0	0			0				0	0	0	-	-	0,00
1	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	paket	4	3.194.210.000	0	0	21	705.736.000	21	705.124.000	100	100	0	-	21	705.124.000	525	22,08

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2023)			
												Target Kinerja (n-1)		Realisasi (n-1)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)	
								Tatget	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Tingkat Realisasi	anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12= (10/8*100)	13= (11/9*100)	14	15	16=(6+10+14)	17= (7+11+15)	18=(16/6*100)	19= (17/7*100)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	%																
1	02	02	2,01		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan fasilitas Kesehatan di kampung	%	100	156.859.545.093														
1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	unit	1	17.000.000.000	0	-			1	5.553.254.020	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	1	5.553.254.020	100	32,67
1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	17	15.220.000.000	0	-	2	2.040.758.000	2	2.038.507.000	100	100	0	-	2	2.038.507.000	12	13,39
1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	unit	44	25.270.000.000	0	-	2	1.620.000.000	2	1.593.281.726	100	98	0	-	2	1.593.281.726	5	6,31
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	unit	4	19.027.683.000	0	-	2	2.497.153.009	2	2.491.616.892	100	100	0	-	2	2.491.616.892	50	13,09
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	12	6.100.000.000	0	-			0	0			0	-	0	-	-	0,00
1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	20	5.250.000.000	0	-			0	0			0	79.500.000	0	79.500.000	-	1,51
1	02	02	2,01	12	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	4	3200000000	0	-							0	-	0	-	-	0,00
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PKM	52	12.914.356.493	0	-	5	1.463.106.493	5	1.462.091.000	100	100	0	269.850.000	5	1.731.941.000	10	13,41
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	108	16.038.059.000	0	-	34	2.538.059.000	34	2.414.513.985	100	95	0	-	34	2.414.513.985	31	15,05
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Paket	5	19.442.347.000	0	-	1	3.476.353.963	1	3.414.512.551	100	98	1	-	2	3.414.512.551	40	17,56
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Paket	111	15.465.648.400	0	-	21	2.416.309.437	21	2.314.551.739	100	96	0	-	21	2.314.551.739	19	14,97
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Unit	200	60.000.000	0	-							30	175.000.000	30	175.000.000	15	291,67
1	02	02	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	5	1.360.941.200	0	-							0	9.334.500	0	9.334.500	-	0,69
1	02	02	2,01	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Orang	251.600	510.510.000	0	-							0	-	0	-	-	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2023)			
												Target Kinerja (n-1)		Realisasi (n-1)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)	
								Tatget	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Tingkat Realisasi	anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12= (10/8*100)	13= (11/9*100)	14	15	16=(6+10+14)	17= (7+11+15)	18=(16/6*100)	19= (17/7*100)
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat	%	100	152.370.649.700														
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	5	24.951.478.000	0	-	1	3.146.648.000	1	2.730.594.698	100	87	0	-	1	2.730.594.698	20	10,94
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	4.608.191.200	0	-	1	755.233.000	1	755.233.000	100	100	0	-	1	755.233.000	20	16,39
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	5	305.255.000	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	100	100	0	-	1	50.000.000	20	16,38
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	1.894.350.000	0	-	1	270.000.000	1	269.781.300	100	100	0	-	1	269.781.300	20	14,24
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Dokumen	5	626.920.000	0	-	1	70.000.000	1	70.000.000	100	100	0	-	1	70.000.000	20	11,17
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Dokumen	4	116.025.000	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	-	-	0,00
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	876.150.000	0	-	1	208.000.000	1	208.000.000	100	100	0	-	1	208.000.000	20	23,74
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	kampung	10	3.023.365.650	0	-	4	470.815.650	4	470.427.880	100	100	0	-	4	470.427.880	40	15,56
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5	11.139.402.400	0	-	1	1.179.202.400	1	1.178.895.500	100	100	0	38.314.500	1	1.217.210.000	20	10,93
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	45.234.451.500	0	-	1	12.463.429.504	1	12.211.019.156	100	98	0	-	1	12.211.019.156	20	26,99
1	02	02	2,02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dokumen	5	4.050.750.000	0	-	1	570.000.000	1	570.000.000	100	100	0	-	1	570.000.000	20	14,07
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	37.071.419.000	0	-	1	25.236.869.000	1	25.214.304.795	100	100	0	235.319.650	1	25.449.624.445	20	68,65
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5	13.206.481.950	0	-	1	1.803.981.950	1	1.803.981.950	100	100	0	155.000.000	1	1.958.981.950	20	14,83
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Unit	32	2.797.960.000	0	-	5	606.820.850	5	250.160.850	100	41	0	58.278.000	5	308.438.850	16	11,02
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	5	1.672.300.000	0	-	1	280.000.000	1	280.000.000	100	100	0	-	1	280.000.000	20	16,74
1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	5	796.150.000	0	-	1	100.000.000	1	85.700.000	100	86	0	-	1	85.700.000	20	10,76
1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	0	-	0	-							1	43.082.000	1	43.082.000	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2023)			
												Target Kinerja (n-1)		Realisasi (n-1)		Tingkat Realisasi						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)	
								Tatget	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Tingkat Realisasi	anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12= (10/8*100)	13= (11/9*100)	14	15	16=(6+10+14)	17= (7+11+15)	18=(16/6*100)	19= (17/7*100)
1	02	02	2,03		Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terinegrasi		Dokumen	2	4.211.802.000														
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	5	336.631.000	0	-	1	58.171.000	1	58.171.000	100	100	0	-	1	58.171.000	20	17,28
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5	3.875.171.000	0	-	4	171.762.175	4	170.813.565	100	99	0	-	4	170.813.565	80	4,41
1	02	02	3.02'		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	-														
1	02	02	3.02'	51	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Malaria Sesuai Standar	orang											4700	129.808.000	4700	129.808.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	02	3.02'	54	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar	orang											0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	02	02	3.02'	57	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	kampung											144	50.235.000	144	50.235.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar**	**%**																
1	**02**	**03**	2,02		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota		Orang	225	51.644.210.000														
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	836	51.318.450.000	0	-	141	8.336.600.000	141	8.332.850.000	100	100	56	1.297.750.000	197	9.630.600.000	24	18,77
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5	325.760.000	0	-	1	47.300.000	1	47.300.000	100	100	1	51.870.000	2	99.170.000	40	30,44
1	**02**	**03**	2,03		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Orang	72	510.510.000	0	-												
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200	510.510.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	-	-	0,00
1	**02**	**03**	3.04'		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di		orang	22	-														
1	02	03	3.04'	01	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang											0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Jumlah pelaku Usaha farmasi, alkes dan makanan minuman memenuhi syarat**	**Orang**																
1	02	04	2,01		Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional		Dokumen	1	771.939.100														
1	02	04	2,01	**01**	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5	771.939.100	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	-	-	0,00
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga			1	310.947.000														
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor - PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	4	310.947.000	0	0	1	126.376.000	1	126.180.000	100	100	1	75.898.000	2	202.078.000	50	64,99

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2023)			
												Target Kinerja (n-1)		Realisasi (n-1)		Tingkat Realisasi						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)	
								Tatget	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Tingkat Realisasi	anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12= (10/8*100)	13= (11/9*100)	14	15	16=(6+10+14)	17= (7+11+15)	18=(16/6*100)	19= (17/7*100)
1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Dokumen	1															
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	348075000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	-	-	0,00
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Dokumen	1															
1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajajan dan sentra makanan jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	4	208845000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	-	-	0,00
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa	Unit	50															
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-miniman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	250	692928850	0	-	75	113.500.000	75	60.178.800	100	53	0	-	75	60.178.800	30	8,68
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**																		
1	**02**	**05**	2.01		Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat	Dokumen	1	1.019.551.700														
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5	1.019.551.700	0	-	4	267.000.000	4	267.000.000	100	100	0	-	4	267.000.000	80	26,19
1	**02**	**05**	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1	464.100.000															
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	4	464.100.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	15.500.000	0	15.500.000	-	3,34
						Meningkatkan kualitas pemenuhan SPM																		
						Rata-rata capaian SPM urusan kesehatan	persen																

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)						Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2023)			
												Target Kinerja (n-1)		Realisasi (n-1)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)	
								Tatget	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Target	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Tingkat Realisasi	anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12= (10/8*100)	13= (11/9*100)	14	15	16=(6+10+14)	17= (7+11+15)	18=(16/6*100)	19= (17/7*100)
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat	%	100	121.969.855.000														
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	orang	14.412	15.091.200.000	0	-	223	240.000.000	223	237.625.000	100	99	-	-	223	237.625.000	2	1,57
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	orang	20.053	16.938.805.000	0	-	1250	695.305.000	1250	461.420.000	100	66	-	-	1250	461.420.000	6	2,72
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	orang	20.053	13.880.950.000	0	-	32	190.000.000	32	189.599.400	100	100	-	-	32	189.599.400	0	1,37
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai standar	orang	72.213	7.757.650.000	0	-	80	100.000.000	80	100.000.000	100	100	-	-	80	100.000.000	0	1,29
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	orang	116.180	7.041.500.000	0	-	12	80.000.000	12	80.000.000	100	100	-	-	12	80.000.000	0	1,14
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	orang	612.598	8.966.700.000	0	-	91.220	148.800.000	91.220	148.800.000	100	100	-	-	91220	148.800.000	15	1,66
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	orang	33.591	7.041.500.000	0	-	5.049	80.000.000	5.049	80.000.000	100	100	-	-	5049	80.000.000	15	1,14
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	orang	18.575	8.453.800.000	0	-	2.159	100.000.000	2.159	100.000.000	100	100	-	-	2159	100.000.000	12	1,18
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	orang	14.116	7.525.600.000	0	-	1.057	100.000.000	1.057	99.968.828	100	100	-	-	1057	99.968.828	7	1,33
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	1.054	6.809.450.000	0	-	157	80.000.000	157	80.000.000	100	100	-	-	157	80.000.000	15	1,17
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Orang	2.028	10.560.200.000	0	-	480	350.000.000	480	349.775.000	100	100	92	103.323.500	572	453.098.500	28	4,29
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	orang	252.332	11.902.500.000	0	-	2550	300.000.000	2550	299.650.000	100	100	11.366	6.850.000	13916	306.500.000	6	2,58
					TOTAL				810.286.391.093	0	0	177.158	129.229.247.373	177.171	137.169.870.379	100,01	106,14		4.751.725.453		141.921.595.832		

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Capaian Indikator Utama tahun 2022

Secara umum berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 selanjutnya melalui Reviu RENSTRA Tahun 2020-2021. Dinas Kesehatan telah menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur melalui indikator kinerja. Capaian kinerja Dinas Kesehatan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel TC. 30 (2.2)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

No	Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Target Renstra Perangkat Daerah				Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
	Tujuan	Sasaran		2022	2023	2024	2025	2026			Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023	Tahun 2024 (n+1)	
	T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	73.10	73.20	73.21	73.22	73.23	73.23	Dinas Kesehatan	73	73.10	73.20	73.21	
		S1: Meningkatkan aksessibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ kelurahan	80	82	85	87	90	90	Dinas Kesehatan	78	80	82	85	
		S2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	67	67,3	67,7	67,9	68	68	Dinas Kesehatan	67,16	67	67,3	67,7	
		S3: Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	
		S4: Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	83	85	87	89	91	91	Dinas Kesehatan	81	83	85	87	
		S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Stunting	15	14	13	12	1193	11	Dinas Kesehatan	32	15	14	13	
		S6: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	97	98	99	100	100	100	Dinas Kesehatan	95	97	98	99	
		S7 : Terselenggara Pelayanan SPM Kesehatan	Prosentase Capaian SPM Kesehatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	72	100	100	100	
	T1: Terpenuhinya standar pelayanan umum		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	72	100	100	100	
		S1. Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	C	B	B	B	B	B	Dinas Kesehtan	c	C	B	B	
		S2: Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Prosentase hasil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehtan	99	100	100	100	
		S3: Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata Capaian SKP ASN	85	87	89	91	93	93	Dinas Kesehtan	82	85	87	89	

Dalam melihat secara rinci capaian kinerja, yang dibandingkan dengan dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan target capaian Provinsi papua dan Kementrian Kesehatan tahun 2022, dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	Capaian
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73,2	73,0	99,72 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan 2022

Dalam mendukung capaian Indikator Kinerja Utama, dilaksanakan upaya melalui sasaran kinerja antara lain :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Outcome Program Dinas Kesehatan Tahun 2022

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Program**	**Target**	**Capaian**
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatakan akses dan kualitas layanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68 Tahun	67,45 tahun
	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Prosentase ketersediaan obat esensial Puskesmas	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	96 %	98 %
	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Puskesmas memilki sembilan jenis tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	36 %	23,8%
	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Prosentase Puskesmas melaksanakan STBM	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	20 %	45,45 %
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Terselenggaranya kinerja pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B+	
Terpenuhinya standar minimal pelayanan dasar	Terselengaranya Standard Pelayanan minimal Kesehatan	Kategori Kinerja SPM Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tuntas Madya (80-90%)	Tuntas Madya (84,72%)

Pada tabel diatas, dapat digambarkan bahwa tantangan penyediaan tenaga kesehatan dengan capaian 9 jenis tersedia di seluruh Puskesmas terkendala pada jenis tenaga dokter gigi. Secara umum pemenuhan tenaga dokter, sanitarian, nutrisionis, tenaga kefarmasian/Apoteker, Bidan, Perawat, Tenaga Promosi Kesehatan dan tenaga laboran sudah ada di 22 UPTD Puskesmas se-Kabupaten Jayapura. Sedangkan pada indikator sasaran peningkatan kemandirian masyarakat melalui STBM, 10 UPTD Puskesmas melaksanakan program tersebut untuk pencapaian 5 pilar.

Dalam pelaksanaan Indikator Kinerja utama serta indikator hasil dari program-program kesehatan dalam menunjang sasaran stretegis, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura juga melaksanakan Indikator Kinerja Kunci yang memuat gambaran kinerja kesehatan untuk peningkatan aspek daya saing daerah dan aspek Kesejahteraan Masyarakat yang termuat dalam Rentra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022. Didalam pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci, termuat SPM bidang kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang pelaksanaan SPM Kesehatan yang secara rinci dilaporkan juga melalui website spm.bangda.kemendagri.go.id sebagaimana terlampir dalam laporan kinerja ini.

Capaian indikator Kinerja bidang Kesehatan yang didalamnya terkandung indicator SPM Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (IKU, dan IKK)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA PADA AWAL TAHUN 2017	TARGET 2022	CAPAIAN S.D 31 DES 2022		% Kinerja	Analisis Kinerja
					Absolud	Persen		
	KUALITAS KESEHATAN							
	Indikator Sasaran RPJMD							
1	**Indeks Kesehatan**	**Satuan**		73,2		73,0	99,7	
	Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
2	Angka Usia Harapan Hidup	TAHUN		68,0		67,45	99,2	
3	Prosentase Balita KURANG GizI	%	1,24	<10		4,5	100,0	
4	Prosentase Stunting	%	16	15		13,6	100,0	
	Indikator Aspek Daya Saing Daerah							
5	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	7	100,0	100,0	
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1000 KH	22,7	<23	15	4,8	100,0	
7	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1000 KH	24.92	<30	16	5,1	100,0	
8	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1000 KH	21,1	<23	13	4,2	100,0	
9	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	100.000 KH	188	<220	6	192,0	100,0	
10	Prosentase Distrik memiliki satu Puskesmas	%	100	100	21	100,0	100,0	
11	Rasio dokter per 100.000 Penduduk	100.000 Penduduk	28,5	18	78	57,4	49,7	
12	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		4160	180	663	205,1	87,8	
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	20.08	45		8,0	17,8	
14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	%	85	100	2760	105,8	105,8	
15	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	81.94	95	123	85,4	89,9	
16	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	7	100,0	100,0	
17	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95	97,5	3064	100,0	100,0	
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	40	90		178,4	198,2	
19	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	5221	100,0	100,0	
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	40	100,0	100,0	
21	Penderita diare yang ditangani	%	95	100		106,8	100,0	
22	Angka kejadian Malaria	1000 Penduduk	170	68		368,0	18,5	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA PADA AWAL TAHUN 2017	TARGET 2022	CAPAIAN S.D 31 DES 2022		% Kinerja	Analisis Kinerja
					Absolud	Persen		
23	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	90	100	3.124	95,6	95,6	
24	Cakupan kunjungan bayi	%	70	100		100,0	100,0	
25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	47,3	100	2.624	96,1	96,1	
26	Cakupan pelayanan nifas	%	61	90		100,0	100,0	
27	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	%	71	100	3.137	99,1	99,1	
28	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	55	60		11,0	18,3	
29	Cakupan pelayanan balita	%	66	100	12.266	103,9	103,9	
30	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90	100	3.057	27,0	27,0	
31	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	2	100,0	100,0	
32	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	5	100,0	100,0	
33	Cakupan orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	68.96	100	78.893	91,0	91,0	
34	Cakupan orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	46.17.00	100	4.885	31,6	31,6	
35	Cakupan penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	3	100	2.992	100,6	100,6	
36	Cakupan penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	100	1.993	100,0	100,0	
37	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	0	100	150	100,0	100,0	

Dalam pencapaian hasil kinerja yang digambarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan hasil kinerja Kesehatan berdasarkan nilai target daerah yaitu:

1. **Indikator yang mendapat penilaian kinerja sangat baik** adalah sebanyak 29 indikator atau 78,3 %, naik dari 69,76 % pada tahun 2021.
2. **Indikator yang mendapat penilaian Kinerja Tinggi** adalah sebanyak 2 indikator atau 5.4 % dari total indicator atau turun jika dibanding tahun 2021
3. **Indikator yang mendapat penilaian sedang** adalah sebanyak 0 indikator
4. **Indikator yang mendapat penilaian rendah** adalah sebanyak 1 indikator atau 2,7 % dari total 37 indikator atau turun dari kondisi tahun 2021, karena telah mengalami perbaikan menjadi kinerja sangat baik.

5. **Indikator yang mendapat penilaian sangat rendah** adalah sebanyak 5 indikator atau 13,5 % dari total 37 indikator dengan kondisi turun jika dibandingkan tahun 2021

Jika dianalisis hasil kinerja Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2022 terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yang memuat pelaksanaan SPM Kesehatan dengan target kinerja untuk seluruh indicator (12 Indikator) adalah 100 % maka satu indicator telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

Jika digambarkan dalam table maka dapat diperoleh hasil penerapan SPM Kesehatan DI Kabupaten Jayapura tahun 2022 yaitu :

Tabel. 2.6
Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2022

.

JENIS PELAYAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2022		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang dilayani	Capaian =(4) : (3)X100%
-1	-2	-3	-4	-5
1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2730	2624	96,12
2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2609	2760	105,79
3, PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	3164	3137	99,15
4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah Balita usia 12-59 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	11.810	12.266	103,86
5.PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	11321	3057	27,00
6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	86735	78893	90,96
7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan sesuai standard	15483	4885	31,55
8. PELAYANAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standard	2974	2992	100,61
9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah penderita diabetes mellitus usia>= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1993	1993	100,00
10. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	150	150	100,00
11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuI standard	5221	5221	100,00
12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standard	3267	3124	95,62

Dari data diatas, ditemukan bahwa 50 % dari indikator SPM Kesehatan telah mencapai target sedangkan 50 % lagi masih dibawah target 100 %. Pencapaian terendah pada indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Dalam penilaian nasional

dengan capaian total SPM Kesehatan adalah 84,72 % maka masuk dalam predikat **Tuntas Madya.**

Terdapat perbaikan pencapaian SPM Kesehatan, dimana awal pelaksanaan indikator tersebut, belum semua sumber daya mampu mendorong pelaksanaan program dan kegiatan untuk SPM Kesehatan sehingga beberapa indikator tersebut tidak dikerjakan. Namun sejak 2019 sampai dengan 2022, seluruh indikator SPM Kesehatan telah dilakukan intervensi kesehatan dengan seluruh sumber daya walaupun beberap indiaktor belum mencapai target 100 %n mendapatkan pelayanan sesuai standard.

Hal ini terjadi akibat beberapa pendekatan metodologi layanan yang belum tepat dan maksimal serta masih ada beberapa wilayah yang belum dapat dijangkau dengan baik akibat penyediaan sarana dan prasarana di 144 kampung/kelurahan baru tercapai 79%.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022, pada laporan kinerja tahun 2022 menjadi laporan kinerja akhir masa rencana strategis tersebut. Capaian tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.7

Capaian Kinerja Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUSI OPD	TARGET IKU (RPJMD)	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDG'S	TARGET RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	IKU														
1	Indeks Kesehatan	73,2				71.78	72,2	72,5	73,1	73,2	71,78	72,2	72,38	72,5	73
	IKK														
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
1	Angka usia harapan hidup	68				66,9	67,3	67,7	67,9	68	66,66	66,93	67,05	67,2	67,45
2	Prosentase Stunting pada balita			15		23	20	17	16	15	0	16,67	16,37	9,0	13,6
3	Presentasi Balita Gizi Kurang					<10	<10	<10	<10	<10	1,73	7,64	9,21	6,8	4,5
	Layanan Urusan Wajib Dasar														
1	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			<23		<23	<23	<23	<23	<23	14,1	29,5	25,8	30,7	4,8
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			<30		<30	<30	<30	<30	<30	15	33,2	27,4	33,9	5,1
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup			<23		<23	<23	<23	<23	<23	12,4	24,5	24,8	29,4	4,2
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup			<235		<250	<240	<235	<230	<220	119	167,8	33	195,8	192,0
6	Prosentase Distrik memiliki satu Puskesmas			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
7	Rasio dokter per 100.000 Penduduk			20		28	26	24	20	18	40,4	48,6	41	46,2	57,4

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUSI OPD	TARGET IKU (RPJMD)	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDG'S	TARGET RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			347,39		4160	4162	4162	200	180	197,22	185,64	185,32	167,5	205,1
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			45		25	30	35	40	45	58,8	67,1	22,5	76,9	8,0
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan		100			88	91	93	96	100	91,1	95,1	96,3	108,0	100,0
11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			95		85	85	85	90	95	89,58	84,03	83,33	81,0	85,4
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak			97,5		95,5	96	96,5	97	97,5	101,2	101,61	97,55	112,5	100,0
14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani			90		50	60	70	80	90	164,6	90,7	134,9	33,5	178,4
15	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			100	100	100	100	100	100	96,67	100	80,0	75,0
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
17	Penderita diare yang ditangani			100		95	97	98	100	100	120,9	96,6	80,8	48,5	106,8

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUSI OPD	TARGET IKU (RPJMD)	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDG'S	TARGET RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
18	Angka kejadian Malaria			50		130	110	90	70	68	147,3	140,3	171,3	192,4	368,0
19	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		100			95	97	100	100	100	100	100	100	95,6	96,0
20	Cakupan kunjungan bayi		100			77	84	92	100	100	73,32	77,47	51,87	61,9	100,0
21	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		100			55	60	63	100	100	57,7	68,9	68,8	77,3	85,7
22	Cakupan pelayanan nifas			90		65	70	75	80	90	99,5	90,7	91,7	106,8	100,0
23	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar			100		80	90	100	100	100	94,01	97,85	90,96	100,0	100,0
24	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			60		56	57	58	59	60	41,1	36,3	51,8	45,8	11,0
25	Cakupan pelayanan balita		100			76	84	92	100	100	79,56	95,52	35,45	58,8	100,0
26	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			95	97	100	100	100	138,66	78,85	21,76	68,8	41,9
27	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
28	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
29	Cakupan orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			70	80	90	100	100	0	35,37	26,16	56,7	91,0
30	Cakupan orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100			50	70	80	100	100	27,34	91,33	88,34	96,4	68,0
31	Cakupan penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			80	90	95	100	100	80,8	160,8	73,6	78,1	100,0
32	Cakupan penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100			80	90	95	100	100	24,7	102	56,4	50,3	100,0
33	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100			80	90	95	100	100	68,7	105,2	157,3	87,9	100,0

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa beberapa indikator telah memiliki penguatan yang cukup baik, terutama pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator SPM Kesehatan dengan pencapaian di tahun 2022 dengan predikat Tuntas Madya. Sedangkan indikator-indikator yang belum maksimal ada pada indikator SDM Kesehatan dan indiaktor layanan Kesehatan Ibu dan Anak pada penanganan komplikasi/ resiko tinggi. Pada penanganan penyakit menular, Angka Kejadian Malaria (API) belum mengalami situasi membaik, walaupun kondisi 2022 diharapkan menjadi titik puncak penemuan kasus dan penanganan sehingga akan mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga eliminasi di tahun 2030.

Pencapaian Target Tahun 2022 dengan target Nasional

Dalam pelaksanaan program kesehatan, terdapat target-target Nasional dan Provinsi Papua yang menjadi target utama sebagaimana telah disampaikan pada Bab II dengan penjelasan sebagaimana termuat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target Nasional

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Jayapura Tahun 2022	Sasaran pada Renstra Dinkes Provinsi Papua	Sasaran pada Renstra Kemenkes RI
1.	Angka Kematian Ibu dan Bayi	**Angka Kematian Ibu sebesar <192/100.000 Kelahiran Hidup** **Angka Kematian Bayi sebesar <4,8/1000 Kelahiran Hidup**	Target Capaian AKI tahun 2023 adalah 200/100.000 KH sedangkan AKB sebesar 20/1000 KH	Target Capaian AKI Nasional 2024 adalah 183/100.000 KH sedangkan AKB adalah 24/1000 KH
2.	Stunting	**Capaian indikator Stunting pada tahun 2022 adalah 13,6 %**	Target Capaian Stunting tahun 2023 adalah 23 %	Target Capaian Stunting pada tahun 2024 adalah 14 %.
3	Imunisasi Dasar Lengkap	**Capakain Indikator Imunisasi Dasar lengkap tahun 2022 adalah 100 %**	Target Capaian Imunisasi Dasar Lengkap tahun 2023 adalah 95%	Target Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Nasional tahun 2024 adalah 100 %

Dari gambaran tabel diatas, bahwa capaian kinerja di akhir masa rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2022 telah melampaui target indikator Provinsi Papua dan Secara Nasional.

Capaian Kinerja Keuangan 2022

Dari laporan Realisasi FIsik dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jayapura pada tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat alokasi dana APBD (APBD Perubahan 2022) sebesar Rp 134.345.691.159,- dalam bentuk Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 52.088.685.063 dan Belanja Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 82.257.006.096 yang terbagi atas belanja urusan penunjang pemerintahan sebesar Rp. 2.373.007.825 dan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 79.883.998.271 *(Sumber data: DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2022).* Terjadi peningkatan jumlah anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp. 7.590.743.828 dengan struktur anggaran sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 2.9

Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.745.619.763	54.381.692.888
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60.228.951.568	71.073.222.271
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.737.500.000	8.383.900.000
4	Rogram Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	239.876.000	239.876.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	167.000.000	267.000.000

Peningkatan anggaran dari DPA induk kepada DPA perubahan lebih kepada penambahan anggaran pada sub kegiatan pembangunan puskesmas Khomba Waliyauw dan Rehabilitasi Puskesmas Yokari yaitu penbiayaan lanjutan tahun 2021 serta perubahan pada struktur pembiayaan Jaminan Kesehatan pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarkat sebagaimana terlampir.

Anggaran tahun 2022 tersebut naik signifikan dari tahun 2021 oleh karena penambahan anggaran DAK dan kebijakan Pembiayaan bantuan PBI bagi masyarakat kabupaten jayapura melalui DBH dan BHP Provinsi Papua.

Anggaran untuk membiayai program wajib Pelayanan Dasar sesuai RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 adalah Rp 67.246.086.888 atau alokasi anggaran tahun 2022 sebesar 119 % dari ketetapan RPJMD untuk tahun 2022. Dengan realisasi

keuangan belanja sebesar Rp 130.435.351.986,-atau 97,08 %; dengan rincian sebagaimana pada lampiran

Tabel 2.10
Gambaran Alokasi Anggaran sector Kesehatan tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1	Retribusi Daerah	20.000.000
2	lain-Lain PAD yang sah	6.364.372.218
B	Belanja Daerah	
	Belanja Operasi	
1	Belanja Pegawai	54.063.613.063
2	Belanja Barang dan Jasa	63.928.386.370
3	Belanja Hibah	350.000.000
C	Belanja Modal	
1	Belanja Modal Peralatan Mesin	3.472.980.384
2	Belanja Modal Gedung dan bangunan	11.187.604.849
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.343.106.493

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa postur anggaran kesehatan sudah memenuhi syarat alokasi anggaran. Alokasi Anggaran dari DAK dan OTSUS menjadi sumber pembiayaan terbesar yang dikelola pada sector kesehatan sehingga banyak program dan kegiatan merupakan aktivitas pembangunan kesehatan yang menjadi arahan Kementrian Kesehatan dan Provinsi Papua, sedangkan anggaran bersumber DAU/DID/DBH dan Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian dalam kebijakan untuk pelaksanaan penanganan covid-19 di Kabupaten Jayapura serta pembiayaan kegiatan inovasi daerah, manajemen pelayanan dan pembiayaan kebutuhan sarana kesehatan di kampung.

Pelaksanaan Program dan kegiatan wajib tersebut yang terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022, diperoleh realisasi program kegiatan berupa realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja.

Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berdasarkan APBD tahun 2022 adalah:

1. Retribusi Jasa Umum berupa Jasa Pelayanan Kesehatan pada DPA induk sebesar Rp. 50.000.000 dan DPA Perubahan sebesar Rp. 20.000.000

2. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah berupa dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai DPA perubahan sebesar Rp. 6.384.372.218

Dari target diatas, realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2022 adalah :

1. Retribusi Jasa umum terealisasi 26.299.000 atau 131,4 %
2. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah melalui dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 6.364.372.218 atau 100 %

Belanja

Dalam pelaksanaan belanja terhadap 5 program 15 kegiatan dan 60 sub kegiatan diperoleh realisasi fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 97,08 %. Dalam pelaksanaan belanja tahun 2022, dibagi atas dua bagian yaitu :

a. Operasi dengan nilai sebesar Rp. 118.341.999.433 yaitu :
   - Belanja Pegawai realisasi sebesar Rp.59.153.520.645
   - Belanja Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp. 55.282.647.024
   - Belanja Hibah realisasi sebesar Rp. 350.000.000

b. Modal dengan nilai Rp. 16.003.691.726 yaitu :
   - Belanja Modal Peralatan dan Mesin realisasi sebesar Rp. 3.153.663.859
   - Belanja Modal Gedung dan bangunan realisasi sebesar Rp. 11.153.099.458
   - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi realisasi sebesar Rp. 1.342.421.000

Belanja pada masing-masing bidang antara lain :

1. Sekretariat

   Pelaksanaan belanja pada kegiatan-kegiatan administrasi dan penunjang pelayanan kesehatan dalam rangka memper kuat manajemen kesehatan dan gaji ASN. Sekretariat mengelola 2 Program, 7 Kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan anggaran sebesarRp.54.268.650.400.

2. Bidang P2P

   Pelaksanaan belanja pada bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit difokuskan pada program-program layanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yaitu 1 Program dengan 1 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5.784.460.333.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

   Pelaksanaan belanja pada bidang Kesehatan Masyarakat difokuskan pada program-program Kesehatan Ibu dan Anak dalam menekan angka kematian ibu, bayi dan balita, kemudian program gizi, program Kesehatan lingkungan, program promosi kesehatan, program Kesehatan Kerja atau K3 sehingga pencapaian Usia Harapan Hidup sesuai target dapa tercapai. Bidang Kesehatan Masyarakat mengerjakan 3 Program dengan 6 Kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.037.414.000.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

   Pelaksanaan belanja pada bidangPelayanan Kesehatan difokuskan pada program-program pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan sehingga pencapaian Usia Harapan Hidup sesuai target dapat tercapai. Bidang Pelayanan Kesehatan mengerjakan 1 Program dengan2 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Dalam pelaksanaan 12 sub kegiatan tersebut, 2 sub kegiatan dilakukan langsung/dikelola oleh Puskesmas secara mandiri menggunakan dana JKN (PAD) dan dana BOK Puskesmas (DAK Non Fisik) dengan anggaran sebesar Rp. 56.635.437.296.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

   Pelaksanaan belanja pada bidang Sumber Daya Kesehatan difokuskan pada pemenuhan Sumberdaya manusia kesehatan melalui rekruitmen tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta pemenuhan logistik kesehatan berupa obat dan perbekalan kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan mengerjakan 2 Program dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.14.276.653.400

Secara keseluruhan baik jumlah Program,kegiatan, sub kegiatan , jumlah anggaran dan Realisasi anggaran disajikan dalam tabel realisasi sickat sebagaimana terlampir .

Pelaksanaan anggaran dalam menghasilkan kinerja perangkat daerah yaitu Indeks Kesehatan cukup efektif yaitu pada 99,7 % dengan realisasi keuangan 97,08 %. Keberhasilan sangat ditunjang oleh :

1) Pelaksanaan indikator program atau outcome yang maksimal dengan realisasi anggaran yang sangat baik.
2) Perencanaan anggaran dan kegiatan yang terintegrasi dengan Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPK) UPTD Puskesmas mendorong pencapaian kinerja dan realisasi keuangan sejalan. Prioritas pada target kinerja dan fokus pada pencapaiannya memampukan seluruh pihak mencapai upaya yang maksimal
3) Dukungan mitra kerja yaitu :
    a. CSR PT.Angkasapura dalam program gizi dan stunting di lokus-lokus yang berdekatan dengan bandara udara Sentani mampu mendukung pencapaian target-target kinerja gizi masyarakat
    b. UNICEF dalam program kesehatan ibu dan anak, baik pelaksanaan manajemen penurunan angka kematian ibu dan bayi serta MTBS untuk balita, mendorong upaya Usia Harapan Hidup dapat maksimal dilaksanakan.
    c. GAPAI, dan Global Fund membantu program penanggulangan malaria untuk mencapai eliminasi malai tahun 2027 memfokuskan pada pelibatan kader/masyarakat.
4) Penguatan pemenuhan SDM Kesehatan melalui anggaran OTSUS dan DAU

Tantangan dan kegagalan pencapaian target kinerja ditemukan pada indikator-indikator pelayanan usia produktif sesuai standard, pelayanan usia lanjut sesuai standard dan penanggulangan malaria.

Hal tersebut terjadi akibat masih kurangnya ketersediaan posbindu dan poslansia sebagai pintu pelaksanaan program dan belum terintegrasinya

poslansia/posbindu dengan puskesmas pembantu. Akibatnya akses masyarakat kepada layanan kesehatan penanggulangan penyakit tidak menular tersebut terbatas.

Solusi yang dapat dilaksanakan adalah tidak menetapkan UKBM harus ada disetiap kampung dengan tantangan ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas dan pembiayaan kader yang juga terbatas. Integrasi posbindu dan poslansia serta posyandu dengan puskesmas pembantu diharapkan dapat membuka akses layanan kesehatan lebih luas dan seluruh kegiatan dipusatkan di puskesmas pembantu. Selain itu, diperlukan penguatan pembiayaan SPM Kesehatan melalui dana BOK Puskesmas dan didukung pembinaan dari Dinas Kesehatan.

2.3.Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Masalah Pokok.

Dari analisis masalah terhadap berbagai sector pembangunan, dari sector kesehatan dapat disimpulkan masalah pokoknya yaitu belum optimalnya Kualitas pelayanan Kesehatan melalui dokumen RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026 yaitu :

a. Masih terbatasnya tenaga para medis dan tenaga dokter spesialis.
b. Keterbatasan sarana transportasi dalam mendukung pelayanan Kesehatan didaerah terpencil.
c. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.
d. Belum optimalnya pemenuhan gizi sesuai standar untuk pencegahan *stunting*.
e. Meningkatnya penderita diabetes, hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya.
f. Meningkatnya orang dengan gangguan kejiwaan

Dalam analisis lebih rinci, dapat ditemukan beberapa masalah pokok tambahan dari sektor kesehatan yaitu :

a. Disparitas Kualitas Lingkungan hidup di beberapa wilayah
b. Tingginya Penyakit menular endemis

Masalah Urusan Wajib Dasar

Dari sector Kesehatan dapat dianalisis beberapa hal yaitu :

a. Angka harapan hidup Tahun 2020 mencapai 67.05 tahun, telah melewati angka harapan hidup Provinsi Papua tahun 2019, yakni 65.79 tahun, namun masih jauh dari capaian ideal yakni 85 tahun.

b. Masalah penyakit infeksi belum dapat diatasi namun masalah baru sudah harus segera mendapat perhatian, yaitu penyakit degeneratif dan penyakit kronis (hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner dan sebagainya) yang frekuensinya semakin bertambah, menimbulkan beban ganda dan berimplikasi pada perencanaan di bidang kesehatan.

c. Penyakit HIV/AIDS pada tingkat yang mengkhawatirkan yang memberi dampak negatif di bidang kesehatan, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan.

d. Sarana/fasilitas kesehatan yang masih terbatas untuk menjangkau luasnya wilayah serta kesulitan geografis. Sampai akhir tahun 2021 tersedia dua rumah sakit umum milik pemerintah dan TNI, 21 Puskesmas, 69 Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 Polindes, 5 Pusling Air dan 26 kendaraan Pusling Darat dengan rincian 19 kendaraan baik dan 7 kendaraan rusak sedang-berat, dan memiliki 3 kendaraan PSC 119 serta 1 kendaraan ambulance jenazah yang dikelola Distrik Demta. Rasio posyandu/balita 1:48; rasio dokter PNS terhadap penduduk 1:167,5; rasio puskesmas terhadap wilayah 1:1 distrik.

e. Sarana Prasarana dan Alat kesehatan pada beberapa bidang layanan di Rumah Sakit Umum Daerah masih sangat terbatas.

f. Masih Terbatasnya Tenaga Doker Spesialias di RSUD dan Puskesmas mampu PONED

g. Sebanyak 30.6 % dari 144 Kampung/Kelurahan belum mempunyai tempat pembuangan akhir tinja hanya menggunakan kolam/sawah, sungai, lubang tanah, dan lainnya sebagai tempat buang air besar. Sekitar 45.32 % rumah tangga di Kabupaten Jayapura beresiko terkena pencemaran sumber air minum.

h. Tenaga kesehatan belum merata terdistribusi sampai ke tingkat kampung.

i. Masih minimnya fasilitas penunjang pelayanan posyandu di beberapa kampung.

j. Belum meratanya sarana prasarana dan alat kesehatan kesehatan di setiap kampung.

k. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas 24 jam di wilayah-wilayah yang jangkauan terbilang cukup jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

l. Masih adanya kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas.

m. Masih tingginya kasus kematian bayi umur 0 sampai kurang dari 1 tahun.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, adalah :

1. Akses Layanan Kesehatan oleh Masyarakat belum optimal yaitu pada angka 78 % dari total 144 Kampung/Kelurahan
2. Keterbatasan SDM Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas pada Puskesmas Kriteria Pedesaan dan Sangat terpencil serta distribusi SDM Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan belum merata.
3. Peralatan Puskesmas masih terbatas dalam melakukan layanan-layanan kesehatan, terutama layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Unit Gawat Darurat, dan Upaya-upaya Kesehatan Masyarakat.
4. Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 4 Puskesmas terbatas dan belum mencapai standard menurut Permenkes No. 43 tahun 2019
5. Tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang prima semakin tinggi
6. Beban ganda pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular.
7. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020

Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan

1. Puskesmas telah ada diseluruh Distrik di Kabupaten Jayapura
2. Petunjuk Teknis penggunaan dana Kapitasi JKN pada FKTP mendukung pemenuhan sarana dan prasarana FKTP/Puskesmas yang disesuaikan dengan anggaran yang diterima
3. Kebijakan Pemenuhan SDM Kesehatan melalui penyediaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberbagai jenjang Pemerintahan
4. Anggaran Dana Desa/Kampung dapat mendukung pelayanan kesehatan di kampung-kampung.

Penanganan Covid-19

DI Kabupaten Jayapura, terkonfirmasi covid-19 pertama kali sebanyak 2 orang dengan menunjukkan gejala ISPA dengan sampel yang diambil pada tanggal 30 Maret 2020. Saat ini pada tanggal 31 Desember 2022, terkonfirmasi covid 19 sebanyak 4.267 pasien dengan total pasien aktif sebanyak 0 orang , pasien Sembuh 4.142 pasien atau 97 % dan Meninggal sebanyak 125 orang atau 3 %.

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Isu strategis penanganan Covid-19 di Kabupaten Jayapura adalah :

1. Angka Kematian yang mencapai 4 % atau diatas rata-rata nasional dan Provinsi Papua
2. Positivity rate berada di angka 22,5 % atau diatas rata-rata WHO, dan nasional dengan batasan tertinggi adalah 20%
3. Komunikasi resiko yang belum berjalan dengan optimal, dengan kondisi-kondisi berita hoaks yang sangat mempengaruhi melalui media sosial.
4. Penanganan pasien covid-19 di Kabupaten Jayapura dengan 2 tata laksana utama yaitu isolasi rumah sakit dan isolasi mandiri.
5. Pelaksanaan tracing, testing dan treatment yang perlu ditingkatkan di layanan kesehatan dan masyarakat.
6. Vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2022
7. Kampanye 3 M

Sedangkan pernyataan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, menyatakan ada 9 strategi penanganan covid-19 yaitu :

1. Koordinasi, perencanaan, dan pemantauan.
2. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat.
3. Surveilans tim gerak cepat dan investigasi kasus COVID-19.
4. Pengaturan mobilitas pintu masuk transportasi internasional dan Pembahasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
5. Pengembangan laboratorium nasional.
6. Pencegahan dan pengendalian infeksi.
7. Menyusun dan melaksanakan tata laksana kasus COVID-19.
8. Memberikan dukungan operasional dan logistik ke seluruh daerah.
9. Mempertahankan sistem pelayanan kesehatan yang esensial.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Pada rancangan awal RKPD yang merupakan hasil sinkronisasi perencanaan awal Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten. Dalam proses tersebut terdapat beberapa analisis dan perubahan didalam rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 tersebut antara lain:

a. Akreditasi Puskesmas sebagai bagian dari roadmap Rencana Strategis Kementrian Kesehatan RI 2015-2019 dan dikuatkan dalam Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, sehingga Pencapaian target puskesmas terakreditasi di kab Jayapura sampai dengan 2024 menjadi salah satu fokus penting dalam rencana kerja tahun 2024 berdasarkan roadmap yang telah ditetapkan.
b. Rekonstruksi bangunan kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta penguatan prasarana dan alat kesehatannya.
c. Penyediaan Rumah dinas bagi petugas kesehatan
d. Pelaksanaan Permenkes RI No. 4 tahun 2019 tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang Kesehatan yang memiliki 12 indikator dengan beberapa sektor penguatan yaitu pada Program KIA, Penanggulangan Penyakit Menular, penanggulangan Penyakit Tidak menular maka arahan Rencana Kerja 2024 telah

diarahkan untuk mengakomodir pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan pada tahun anggaran 2024.

e. Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) dengan salah satu pilar STOP BABS menjadi sasaran kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan guna menurunkan angka kesakitan akibat Lingkungan yang tidak sehat.
f. Kegiatan Monitoring terpadu ke fasilitas layanan kesehatan. Kegiatan ini menjadi tanggapan atas hasil survei meter bekerjasama dengan USAID-RTI, dalam mensurvei layanan kesehatan di masyarakat. Dalam kegiatan ini, akan dilakukan monitoring terpadu dari seluruh bidang program kesehatan ke distrik dan kampung dalam kaitannya layanan teknis dan non-teknis kesehatan sehingga mendapat data dan masalah yang terjadi secara *updated* dan memberikan masukan perencanaan yang baik bagi Fasyankes dan Dinas Kesehatan Kab. Jayapura
g. Penguatan peran serta masyarakat melalui penguatan Koordinasi dengan Badan Peduli Kesehatan Kab Jayapura sampai tingkat distrik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang memerlukan peran serta masyarakat baik serta optimalisasi UKBM seperti Posyandu, Posbindu dan Poslansia
h. Pembangunan sarana Fasyankes, akan dikembangkan dalam pengembangan sarana serta prasarana Puskesmas non perawatan agar dapat melayani rawat persalinan serta penguatan prasarana puskesmas keliling sesuai dengan permenkes no.43 tahun 2019 dengan memperhatikan ketersediaan tanah oleh masyarakat.
i. Pelaksanaan inovasi penanggulangan Malaria melalui Program Kampung Siaga Malaria
j. Penguatan Puskesmas dalam melaksanakan tugas preventif dan promotif menggunakan dana DAK Non Fisik/BOK melalui pendampingan pelaksanaan kegiatan.
k. Integrasi Pelayanan Puskesmas Pembantu dengan Posyandu, Poslansia dan Posbindu.
l. Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura sesuai peraturan bupati yang ditetapkan dengan target mengalami penurunan 1 %/tahun

m. Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyaraka untuk pencapaian universal Health Coverage (UHC)

n. Pelayanan perlindungan pangan dan bahan kimia yang beredar di masyarakat serta dukungan atas tumbuhnya UMKM yang sesuai dengan standard melalui kerjasama bersama BPOM.

Secara khusus review terhadap RKPD Kabupaten Jayapura tahun 2024 dapat tergambar melalui tabel dibawah ini :

Tabel TC. 31

(2.11) Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Kab. Jayapura

No	Rancangan Awal RKPD										Catatan Analisa
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sentani	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	61.270.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sentani	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	101.911.700	
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sentani	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	27.500.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Penyusunan RKA Perubahan dengan rapat internal Dinas Kesehatan sehingga tanpa biaya
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sentani	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	27.280.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sentani	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	24.789.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sentani	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	23.760.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sentani	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	44.654.046	Evaluasi kinerja bersama Puskesmas ditambah volume pelaksanaan termasuk evaluasi keuangan BOK Puskesmas
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			%		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Sentani	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6700 Orang/Bulan	62.424.510.000	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Sentani	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6700 Orang/Bulan	61.830.399.752	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Sentani	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	653.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Sentani	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	650.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sentani	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sentani	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Pengawasan BMD secara khusus SPA yang disesuaikan dengan laporan ASPAK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			%		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sentani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18.150.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sentani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	Penguatan kepala TU UPTD dinas dalam rangka SIASN, SISDMK dan Renbut
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sentani	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	18.150.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sentani	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	44.610.000	Penambahan lokasi Monev dalam rangka perhitungan SKP Jabatan fungsional
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Sentani	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	27.500.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Sentani	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	20.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sentani	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	170.998.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sentani	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	258.588.000	Penyediaan pembiayaan PIM dan Ujian Kompetensi ASN
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sentani	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	75.812.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sentani	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	40.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			%		Administrasi Umum Perangkat Daerah			%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sentani	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sentani	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sentani	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	18.150.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	21.439.150	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sentani	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	133.697.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sentani	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	137.143.204	
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Sentani	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	39.455.900	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Sentani	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	34.670.000	
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Sentani	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.630.000	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Sentani	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sentani	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	42.240.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sentani	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	34.909.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sentani	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	212.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sentani	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			%		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sentani	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Masih Menggunakan Aset yang ada
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Sentani	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Penambahan gedung kantor dilaksanakan pada 2024 dengan mempertimbangkan tersedia anggaran
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Sentani	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		Evaluasi terhadap sarana dan prasarana kantor masih cukup baik
	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%		Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%		
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Sentani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	513.700	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Sentani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	425.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Sentani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	43.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Sentani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.080.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Sentani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.075.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Sentani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.410.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%		
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sentani	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	240.758.100	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sentani	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	96.530.000	Pemeliharaan kendaraan Operasional Puskesmas ditetapkan dalam sub kegiatan operasional puskesmas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sentani	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	77.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sentani	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	87.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sentani	Jumlah sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	1 paket		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sentani	Jumlah sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	1 paket	22.440.000	penyediaan pemeliharaan genset dan AC kantor

No	Rancangan Awal RKPD										Catatan Analisa
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			%		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			%		
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	WP II, III dan IV	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	4 unit	4.500.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kampung Kamikaro, Aurina, dan Kampung Nambom	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 unit	3.600.000.000	Peningkatan Sarana Puskesmas Pembantu pada daerah sulit mencapai 100 %
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	WP II, III dan IV	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	8 unit	5.500.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kemtuk, Gresi Selatan, Sentani Barat dan Waibu (Sosiri), Namblung	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	8 unit	6.000.000.000	Prosentase prasarana pada ASPAK untuk puskesmas meningkat 20 %
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	kampung sosiri	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	5.000.000.000	Prosentase sarana pada ASPAK Puskesmas Kanda mencapai 100 %
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	WP II, III dan IV	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	900.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kampung Sp4	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1.300.000.000	Peningkatan sarana Pustu mencapai 100 %
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	WP II, III dan IV	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5 Unit	1.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Kaureh	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	400.000.000	Prosentase prasarana di Puskesmas Lereh meningkat diatas 70 %
	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	WP III dan IV	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 Unit	900.000.000	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan			Penguatan pada Penyediaan sarana di Kampung sehingga menunda penyediaan pagar puskesmas dan sarana gedung lainnya
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	12 PKM	2.750.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Kaureh, Gresi Selatan, Nimboran, Yapsi, Kamikaro, Aurina, Namblung	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	5 PKM dan 2 Pustu	6.299.423.000	Prosentase prasarana pada ASPAK di Puskesmas meningkat diatas 70 %
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	3.500.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	6.364.000.000	Prosentase Alat Kesehatan pada ASPAK di Puskesmas meningkat diatas 80 %
	Pengadaan Obat dan Vaksin	19 Distrik	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	3.850.000.000	Pengadaan Obat dan Vaksin	19 Distrik	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	4.500.000.000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	19 Distrik	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	22 PKM	3.080.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	19 Distrik	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	22 PKM	3.602.799.000	
	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	19 Distrik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	19 Distrik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	175.000.000	Prosentase Alat Kesehatan pada ASPAK di Puskesmas meningkat diatas 80 %
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19 Distrik	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	269.720.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	19 Distrik	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	378.379.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	19 Distrik	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2.500 Orang	121.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	19 Distrik	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2.500 Orang	150.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			%		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	4.950.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	47.050.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	913.220.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.135.358.459	Pelayanan Gizi baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas, terutama penanggulangan gizi buruk dan Stunting
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	60.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	286.345.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	385.000.000	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.329.232.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas, terutama pencapaian Kampung ODF 100 %
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	132.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	27.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	25.000.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	165.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	621.295.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Airu dan Kaureh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 kampung	605.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Airu dan Kaureh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 kampung	471.475.400	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	2.420.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1.486.674.740	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	8.789.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	12.887.797.000	Pencapaian UHC >98% melalui bantuan PBI serta belanja kapitasi FKTP
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Dokumen	825.000.000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 Distrik	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar-Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Dokumen	100.000.000	Pembinaan pelaksanaan telemedicine USG
	Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Distrik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.805.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Distrik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	4.563.949.701	Operasional sarana dan prasarana Puskesmas
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19 Distrik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.750.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19 Distrik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.408.551.000	Operasional sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu serta PMI
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	19 Distrik	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di di Kabupaten/Kota	6 Unit	550.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	19 Distrik	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di di Kabupaten/Kota	6 Unit	689.511.000	Pendampingan persiapan Akreditasi Puskesmas serta Penilaian oleh Surveyor
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	19 Distrik	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	330.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	19 Distrik	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		
	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	165.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	417.100.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	19 Distrik	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedikan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	250.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	19 Distrik	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedikan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	300.000.000	Operasional PSC 119
	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	19 Distrik	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	45.000 Orang	2.800.000.000	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	19 Distrik	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	45.000 Orang	3.221.350.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	19 Distrik	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13 Orang	600.000.000	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	19 Distrik	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	567.365.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	19 Distrik	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.000 Orang	2.000.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	19 Distrik	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.000 Orang	1.807.450.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			Dokumen		Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			Dokumen		
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Sentani	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	66.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Sentani	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	220.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sentani	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	700.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sentani	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	450.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD										Catatan Analisa
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			%		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			%		
	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota			Orang		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota			Orang		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Sentani	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes	50 Orang	10.450.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Sentani	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes	50 Orang	3.038.987.800	Pembiayaan insentif dokter dan petugas pada daerah sulit
	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	66.000.000	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	
	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Orang		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Orang		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	19 Distrik	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	121.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	19 Distrik	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	1.244.429.000	Pelatihan Petugas Puskesmas bekerjasama dengan Bapelkes Provinsi Papua
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					
	Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional					Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional					
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	153.010.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	150.000.000	Pengawasan 40 sarana
	Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga					Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga					
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor - PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	73.700.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	150.000.000	Pengawasan PIRT sebanyak 70 PIRT
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	82.500.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajajan dan sentra makanan jajanan	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	49.500.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajajan dan sentra makanan jajanan	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
	Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga					Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga					
	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-minimam Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	19 Distrik	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	70 Unit	137.335.000	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-minimam Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	19 Distrik	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					
	Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota					Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota					
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19 Distrik	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	202.070.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19 Distrik	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	225.000.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas serta penguatan MSF/Badan peduli Kesehatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	110.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	19 Distrik	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	844.050.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			%		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19 Distrik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.856 orang	3.520.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19 Distrik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.856 orang	4.447.156.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19 Distrik	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.974 orang	3.850.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19 Distrik	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.974 orang	1.151.646.016	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	19 Distrik	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.974 orang	3.245.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	19 Distrik	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.974 orang	369.600.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19 Distrik	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.312 orang	1.815.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19 Distrik	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.312 orang	958.249.784	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19 Distrik	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.026 orang	1.650.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19 Distrik	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.026 orang	563.550.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19 Distrik	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121.413 orang	2.090.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19 Distrik	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121.413 orang	1.481.000.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	19 Distrik	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	6.667 orang	1.650.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	19 Distrik	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	6.667 orang	1.044.237.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	19 Distrik	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.681 orang	1.980.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	19 Distrik	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.681 orang	50.500.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	19 Distrik	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.797 orang	1.760.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	19 Distrik	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.797 orang	228.690.600	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	19 Distrik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	208 orang	1.595.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	19 Distrik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	208 orang	441.800.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19 Distrik	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 orang	2.420.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19 Distrik	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 orang	1.770.114.500	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	19 Distrik	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50.010 orang	2.750.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	19 Distrik	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50.010 orang	1.029.591.000	Pelayanan baik pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan pelaksanaan oleh Puskesmas

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan dari Masyarakat melalui mekanisme Musrenbang mulai dari tingkat kampung, lalu tingkat distrik dan tingkat Kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengikuti proses Musrenbang tingkat Distrik dan menyampaikan rencana-rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 sehingga masyarakat dapat mengakses program atau kegiatan tersebut untuk daerahnya. Kemudian seluruh pengusulan tersebut di input dalam sistem SIPD RI Kabupaten Jayapura yang pada akhirnya dalam forum SKPD, ditampilkan dan disepakati usulan-usulan dari pemangku kepentingan mana yang akan diakomodir dalam RKPD Kabupaten Jayapura tahun 2024.

Pada usulan masyarakat. Dititikberatkan pada beberapa isu antara lain (selengkapnya pada lampiran):

a. Peningkatan sarana dan prasarana di kampung-kampung tertentu, dimana sebagian besar kampung menginginkan pembangunan fasilitas Layanan Kesehatan dan prasarananya
b. Penambahan Kuantitas SDM Kesehatan, antara lain tenaga medis dan paramedis. Beberapa distrik diperoleh data belum diisi oleh tenaga medis sehingga penguatan SDM kesehatan menjadi prioritas masyarakat
c. Pelaksanaan JKN di masyarakat. Pada umumnya masyarakat meminta layanan kesehatan gratis di fasyankes. Sehingga pada musrenbang dijelaskan program pemerintah daerah dalam mendukung program nasional yaitu Jaminan kesehatan Nasional, Kartu Papua Sehat dan Jaminan Persalinan Daerah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat didorong melalui kepala distrik untuk memenuhi secara administratif persyaratan program JKN
d. Sosialisasi Pencegahan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, Malaria dan TBC serta pengembangan kesehatan ibu dan anak.
e. Pemenuhan sarana tempat tinggal bagi petugas kesehatan di puskesmas, agar petugas dapat melakukan pelayanan kesehatan dengan maksimal
f. Sarana dan prasarana puskesmas dalam hal ambulance transport dan mobil jenazah. Namun dalam pembahasan tersebut, disampaikan kepada masyarakat bahwa penyediaan mobil jenazah bukan menjadi

tanggungjawab Dinas Kesehatan, karena tidak didukung dalam sistem penganggaran.

Rincian usulan masyarakat secara lengkap pada tabel dibawah ini :

Tabel TC.32
(2.12)Usulan Program dan kegiatan pada Pemangku Kegiatan Tahun 2023
Kabupaten Jayapura (Sumber: Hasil Musrenbang Kabupaten Jayapura)

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Wilayah Pembangunan I

NO	Usulan/Kegiatan	Lokasi		Target		Keterangan	
		Distrik	Kampung	Volume	Satuan	PD Penanggung Jawab	Status Usulan
13	Pelatihan dan Pengkaderan Kader Posyandu	Sentim	Yokiwa			KESEHATAN	hanya kader Malaria
14	Rehab Pustu	Sentim	Ayapo			KESEHATAN	Masih bagus jadi tdk di Prioritaskan
15	Pengadaan Alat Kesehatan Lansia	Sentim	Asei Kecil			KESEHATAN	Sdh ada di Rutin
16	Pemberian Insentif Kader	Sentim	Asei Kecil			KESEHATAN	Dibiayai oleh dana Otsus 2023 Untuk Kader
17	Insentif Kader Malaria	Sentim	Yokiwa			KESEHATAN	Dibiayai oleh dana Otsus 2023 Untuk Kader
18	Insentif Tenaga Kesehatan	Sentim	Ayapo			KESEHATAN	sdh di anggarkan dana DAU 2023 untuk Dokter saja
19	Pengadaan Alat Kesehatan	Sentim	Ayapo			KESEHATAN	sdh di anggarkan 2023
20	Kegiatan Pencegahan Covid-19	Sentim	Asei Kecil			KESEHATAN	Ditolak (menggunakan dana Kampung)
			Puay				
			Asei Besar				
			Yokiwa				
			Ayapo				
			Kampung Nendali				
21	Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Gizi Buruk	Sentim	Asei Besar			KESEHATAN	ada sedang dilakuakan pengukuran oleh dinas kesehatan
22	Pengadaan Kendaraan Kampung (Motor)	Sentim	Yokiwa			KESEHATAN	Ditolak
23	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ballta, Ibu Hamil dan Lansia	Sentim	Yokiwa			KESEHATAN	DAK 2023
24	Pengadaan Masker	Sentim	Ayapo			KESEHATAN	Sdh di rutin
25	Pembangunan Dan Perluasan Gedung Puskesmas Kanda 2 (Dua) Lantai	Waibu	Kanda	72	M2	KESEHATAN	Ditampung
26	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Paramedis	Waibu	Kanda	2	Unit	KESEHATAN	Ditampung

Wilayah Pembangunan II

No	Usulan/Kegiatan	Lokasi		Target		Keterangan	
		Distrik	Kampung	Volume	Satuan	PD Penanggung Jawab	Status Usulan
1	Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan (Kopel)	Sentani Barat	Dosay	1	Unit	Dinas Kesehatan	Sdh Dilaksanakan Rehab di tahun 2023 sebanyak 1 Unit (Untuk Pembangunan Rumah Dinas yang Baru Dilihat Prioritas (Menyesuaikan Dokumen)
		Yokari		1	Unit		Dipenuhi tahun 2023 (tidak ada Usulan di Kampung)
		Ravenirara		2	Unit		
		Depapre		2	Unit		
2	Pengadaan Alat Pemeriksaan Malaria Hasil Cepat	Sentani Barat		1	Paket	Dinas Kesehatan	Sdh Rutin Dilakukan
3	Pengadaan Kendaraan Operasional	Sentani Barat		1	Unit	Dinas Kesehatan	Dipenuhi tahun 2023 (tidak ada Usulan di Kampung
		Depapre		1	Unit		
4	Solar Sel	Ravenirara		1	Unit	Dinas Kesehatan	Disetujui tahun 2023
5	Pusling Air	Ravenirara		1	Unit	Dinas Kesehatan	Dipenuhi tahun 2023 (tidak ada Usulan di Kampung
		Yokari		1	Unit		Dipenuhi tahun 2023 (tidak ada Usulan di Kampung
6	Permintahan Tenaga Medis	Depapre	Kendate	1	Orang	Dinas Kesehatan	Tahun ini ada penambahan dari tenaga P3K.
		Depapre	Tablasupa	2	Orang	Dinas Kesehatan	Ada Penambahan Dokter
7	Pembangunan Pustu	Depapre	Wambena	1	Unit	Dinas Kesehatan	akan diakomodir sayaratnya ada surat pelapasan Tanah dan Setifikat
8	Pengadaan Obat Anti Bius Ular	Depapre		1	Paket	Dinas Kesehatan	Sdh mengangarkan tapi masih melihat prioritasnya
9	Pembangunan MES Petugas	Depapre		2	Unit	Dinas Kesehatan	persialan ketersediaan tanah lokasi

Wilayah Pembangunan III

	Usulan/Kegiatan	Lokasi		Target		Keterangan	
		Distrik	Kampung	Volume	Satuan	PD Penanggung Jawab	Status Usulan
	Pengadaan alat pembakaran sampah medis	Nimboran	Kampung Yenggu Lama (RT.01/RW.01)	1	Paket	KESEHATAN	sdh ada
	Pembangunan Rumah Dinas Perawat	Gresi Selatan	Puskesmas Sadiyap	5	Unit	KESEHATAN	pembangunan Rumah Kopel dan kendaaran ambulance
	Pengadaan sarana PUSTU Kampung Singgriway	Nimboran	Kampung Singgri (RT.01,02/RW.01)	1	Unit	KESEHATAN	Diterima
	Pemberantasan Nyamuk Malaria (Penyemprotan Rumah Masyarakat)	Nimbokrang	RT 01 - 10	273	KK	KESEHATAN	sdh berjalan dan dinas sudah siapkan alat dan distrik siapkan biaya Operasional
	Pelayanan Puskesmas 24 Jam	Nimbokrang	Kampung Bunyom			KESEHATAN	Bukan rawat Inap, rawat inap di Genyem
	Penambaan Obat-obatan ke PUSTU Berap	Nimbokrang	PUSTU Kampung Berap	1	Paket	KESEHATAN	Rutin tiap tahun
	Tenaga Kesehatan / Kader	Nimbokrang	PUSTU Kampung Berap	2	Orang	KESEHATAN	sdh ada
		Kemtuk Gresi	Nembu Gresi			KESEHATAN	atas Bidang Yohana, sdh ada bidan tpi tak mau kerja karena ada gangguan dari masyarakat
	Upah Tenaga Medis	Nimbokrang	Kampung Berap	3	Orang	KESEHATAN	sdah disiapkan di BOK
	Penambahan ruang pelayanan untuk ibu hamil pada PUSTU	Nimbokrang	RT 02 Kampung Hamonggrang	1	Ruang	KESEHATAN	diteruskan ke Musrembang, harus ada surat pelepasan ke DP2KP
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan (PUSTU)	Nimbokrang	Kampung Nembukrang Sari	1	Unit	KESEHATAN	dikembalikan ke Kampung
	Status Lokasi Puskesmas Kemtuk	Kemtuk	Kampung Sama	1	Paket	KESEHATAN	Dilanjutkan ke DP2KP

Wilayah Pembangunan IV

No	Usulan/Kegiatan	Lokasi		Target		Keterangan	
		Distrik	Kampung	Volume	Satuan	PD Penanggung Jawab	Status Usulan
	Penambahan Tenaga Tenaga Bidan Pustu Yadauw dan Pustu Serebu PKM Kaureh	Kaureh	Yadauw dan Soskotek	2	Orang	KESEHATAN	Diteruskan dengan syarat harus ada perawat yang mau kesana
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala PKM Lereh	Kaureh	Lapua	1	unit	KESEHATAN	dijawab pada tahun 2023
	Pengadaan Mobil Jenazah	Kaureh	Lapua	1	Unit	KESEHATAN	Ditampung ke Musrenbang Kab untuk pemenuhan dokumen usulan berupa operasional Distrik
		Unrumguay	Puskesmas Unurumguay	1	Unit	KESEHATAN	Dikembalikan ke Kampung
	Pembangunan Rumah Tunggu Ibu Bersalin	Kaureh	Lapua	1	Unit	KESEHATAN	Kewenangan Distrik dan Kampung
		Unrumguay	Rumah Tunggu bagi Ibu Melahirkan	1	Unit	KESEHATAN	
	Rehab Rumah Para medis	Unrumguay	Garusa	1	Unit	KESEHATAN	Rehab 1 Kopel
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (motor besar)	Unrumguay	Puskesmas Unurumguay	5	Unit	KESEHATAN	Dikembalikan ke Kampung
		Unrumguay	Lokasi Kantor Unurumguay	5	Unit	DPMK	
	Tambahan Pembangunan Rumah Petugas Kesehatan	Yapsi	Tabbeyan	1	Unit	KESEHATAN	Ditolak karena tdk ada tanah muntuk Dibangun
	Pembangunan Pustu Kamikaro	Airu	Kamikaro	1	unit	KESEHATAN	Ditampung ke Musrenbang Kab untuk pemenuhan dokumen usulan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

Kebijakan nasional Sektor Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 mengangkat visi ““Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dari Visi tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

   Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah

menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita

   Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

   Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

   Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Dalam pelaksanaan RKP tahun 2024, mengambil tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan Arah Kebijakan antara lain :

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan ibukota nusantara
8. Pelaksanaan pemilu 2024

Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut diatas, sektor kesehatan berada pada arah kebijakan ke dua yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan Dokumen RIPPP 2022-2041

Dalam pelaksanaan RIPPP di provinsi Papua sektor kesehatan dengan tujuan PAPUA SEHAT, memiliki sasaran yaitu tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk. Dimensi pembangunan papua sehat antara lain :

1. Akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
2. Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standard di seluruh fasilitas kesehatan
3. Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.

Indikator kinerja yang targetkan pada RKP 2024 dalam mendukung RIPPP tersebut antara lain :

a. Umur Harapan Hidup sebesar 68,66-68,67 di tahun 2041
b. Prevalensi Stunting sebesar 10%

Kebijakan daerah sektor Kesehatan

Dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Papua tahun 2024, Provinsi Papua mengambil tema Memastikan terwujudnya Papua bangkit, Mandiri dan sejahtera yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan Prioritas pembangunan antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan Pemerataan SDM
    c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
    d. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas
    e. Penanganan stunting
    f. Pendidikan afirmasi Papua
2. Pertumbuhan ekonomi inklusif , berkeadilan dan berkelanjutan
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas kewilayahan
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban
5. Peningkatan tata kelola Pemerintahan

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, sektor kesehatan mengambil peran pada peningkatan kualitas dan pemerataan SDM dengan indikator makro pembangunan adalah IPM yaitu 62,1

Tabel 3.1

Komparasi Target Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Jayapura 2023-2026, RIPPP tahun 2022-2041 dan RPJMN Nasional 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Target Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Jayapura tahun 2024	Sasaran pada RIPPP tahun 2041	Sasaran pada Renstra Kemenkes RI
1.	Angka Kematian Ibu dan Bayi	Angka Kematian Ibu sebesar <120/100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi sebesar <19/1000 Kelahiran Hidup		Target Capaian AKI Nasional 2024 adalah 183/100.000 KH sedangkan AKB adalah 24/1000 KH
2.	Stunting	Target Prosentase stunting 29 %	Target Capaian Stunting tahun 2041 adalah 10 %	Target Capaian Stunting pada tahun 2024 adalah 14 %.
3	Usia harapan Hidup	Usia harapan Hidup tahun 2024 adalah 67,7 tahun	Target Capaian Usia harapan Hidup 68,66-68,67 tahun	

Kebijakan Daerah

Mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021, yang mana mengarahkan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada: (1) visi-misi RPJPD, (2) analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat, (3) isu-isu strategis actual.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suaatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah serta dalam rangka

meningkatkan kesejahtraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPDT) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Intruksi Menteri dalam Negeri tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada analisis isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Tujuan strategis Daerah dalam Rencana Pembagunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi

   Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam mempercepat capaian pembangunan manusia sehingga tercipta kualitas manusia yang tinggi. Tercakup didalamnya upaya pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan prestasi pemuda dan olah raga
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera

   Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan social dalam masyarakat. Tercakup di dalamnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan ekonomi pedesaan, pengembangan UMKM dan industri rumah tangga.
3. Meujudkan masyarakaat sadar hukum, ketertiban umum dan Kesatuan Bangsa

   Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam menguatkan kualitas masyarakat dari segi tertib social. Tercakup di dalamnya upaya-upaya pemeliharaan ketertiban umum, perwujudan masyarakat sadar hukum dan moral, penguatan harmoni social antar etnis, kerukunan antar umat beragama, dan wawasan kebangsaan.
4. Mewujudkan masyarakat dan kampung adat yang berdaya

   Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam menguatkan kualitas masyarakat dari segi eksistensi lembaga adat dan kebudayaan daerah. Sebagaimana diketahui Papua secara umum dan Kabupaten Jayapura secara khusus dicirikan oleh sejarah dan eksistensi masyarakat adat serta produk-produk kebudayaan daerah yang spesifik. Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam menguatkan peran lembaga adat dalam berbagai aspek kehidupan, pengembangan kampung adat,

dan revitalisasi produk-produk kebudayaan local/daerah, serta pemenuhan terhadap kewenangan dan hak atas pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Hukum Adat.

5. Mewujudkan jangkauan infrastruktur yang luas dan merata

   Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas wilayah dari segi keterbukaan interkonekvitas wilayah sehingga seluruh sub-wilayah/lokasi yang terisolasi dapat terbuka aksesnya. Tercakup di dalamnya upaya-upaya penataan ruang, pengembangan infrastruktur transportasi, pengembangan infrastruktur perhubungan, pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman, pengembangan kawasan pertanian/agropolitan, pengembangan kawasan industri, pengembangan kawasan pariwisata dan pusa-pusat pertumbuhan.

6. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

   Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas daerah dari segi kelestarian lingkungan hidup. Tercakup di dalamnya upaya-upaya dalam memelihara sumberdaya hutan dan daerah aliran sungai, pengelolaan sumberdaya air, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan bencana serta Penggelolaan Persampahan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

   Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Pemerintah adalah pilar utama dalam pencapaian pembangunan secara berkelanjutan sehingga perlu diperkuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Tercakup dalam tujuan ini upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalisme ASN, menata administrasi keuangan, pelaporan kinerja pelayanan, penyeleggaraan pemerintahan distrik, penyelenggaraan pemerintahan kampung, perencanaaan dan pengawasan pembangunan serta legislasi daerah, termasuk didalamnya adalah upaya-upaya untuk memperkuat Distrik sebagai pusat pelayanan public, pusat pemberdayaan, pusat pelatihan, pusat data dan informasi,pusat inovasi dan pengetahuan, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pada pelaksanaan RKPD tahun 2024, kabupaten Jayapura melaksanakan tema pembangunan yaitu Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kampung Secara Berkesinambungan Dan Peningkatan Serta Pemerataan Kesejahteraan Yang Didukung Oleh Kapasitas Infrastruktur Wilayah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.
Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Jayapura melalui sektor kesehatan dilakukan melalui Misi 1 yaitu Meningkatkan Kualitas manusia antara lain dijelaskan dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian Kinerja Tahun-					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2022	2023	2024	2025	2026		
1	M.1. Meningkatkan kualitas manusia	T.1. **Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi**		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72.10	72.11	72.12	72.13	72.14	72.14	Dinas Pendidikan, Perustakaan, Kesehatan, KB, Perindag, Koperasi, Pariwisata, TPH, Perkebunan dan Peternakan, kelautan dan Perikanan
			S.1. Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	%	72.75	73.15	73.16	73.17	73.18	73.18	Dinas Pendidikan; Perpusatakaan
			S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	%	73.10	73.20	73.21	73.22	73.23	73.23	Dinas Kesehatan
			S.3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita	Rp	10.375	11.325	12.275	13.225	14.175	14.175	Dinas Perindag, Koperasi, Pariwisata, TPH, Perkebunan dan Peternakan, kelautan dan Perikanan
2	M.7 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**CC=50,33**	**CC=50,33**	B	B	B	BB	BB	OPD Pelayanan Publik
			S 7.3: Terpenuhinya standar pelayanan umum	Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan		100	100	100	100	100	100	OPD Pelayanan Publik

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Sektor Kesehatan Memiliki Satu Tujuan yaitu mewujudkan kualitas manusia yang tinggi dengan salah satu sasaran pada sektor kesehatan yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan 31 Indikator Kinerja selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan sehingga hasil Indikator tersebut akan menggambarkan kualitas manusia yang meningkat.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *specific*, *measurable*, *achievable*, *reasonable*, *time-bond* (*SMART-C*).

Dalam mewujudkan sasaran RPD maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura guna mendukung tercapaianya harapan RPD antara lain :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026 untuk mendukung

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Tujuan 1 RPD Kab Jayapura : **Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi**

Sasaran 2 RPD Kab Jayapura : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	%	73.10	73.20	73.21	73.22	73.23	73.23	Dinas Kesehatan
			S1: Meningkatakan akses dan kualitas layanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	66,9	67,0	67,3	67,7	67,9	68	68	Dinas Kesehatan
			S2: Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Prosentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial >80%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S3: Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Puskesmas memilki sembilan jenis tenaga kesehatan	18,1 %	22	27	35	40	45	45	Dinas Kesehatan
			S4: Meningkatnya Kemandirian Masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Prosentase Kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan	31,9	45	70	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			S5. Terselenggara Penanggulangan Stunting	Prosentase Stunting pada balita	9,03	20	17	16	15	15	15	Dinas Kesehatan

Tujuan 7 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran 3 RPD Kab Jayapura : Terpenuhinya standar pelayanan umum

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		T1: Terpenuhinya standar pelayanan umum		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	72	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S1. Terselenggaranya kinerja pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	C	B	B	B	BB	BB	BB	Dinas Kesehtan
			S2: Terselengaranya Standard Pelayanan minimal Kesehatan	Prosentase Capaian SPM Kesehatan	84	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehtan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Jayapura, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 yang termuat dalam Strategi dan Arah kebijakan tahun 2023-2026 sibawah ini :

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi-1: Meningkatkan kualitas manusia.							
Meningkatkan kualitas hidup manusia.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Pemenuhan standar pelayanan Minimal kesehatan Melalui peningkatan akses serta kualitas layanan dalam pencapaian Jayapura Sehat dan mandiri	Peningkatan akses dalam Pencapaian SPM Kesehatan	Penguatan Sumber Daya dalam Pencapaian SPM Kesehatan	Pemerataan S Daya Layanan Kesehatan serta kualitas layanan	Pemerataan Layanan Kesehatan serta kualitas layanan	Pengembangan Sistem Layanan Kesehatan

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jyapura. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*).

Pada Sektor Kesehatan, strategi termuat dalam strategi No.2 yaitu Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan dan strategi No. 9 yaitu Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara beriringan dengan penguatan distrik sebagai pusat pelayanan.

Pembangunan kesehatan untuk peningkatan kualitas manusia dipahami dalam dua dimensi yang bersinergi, yakni mendorong pola hidup sehat dalam masyarakat dan melayani masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan. Promosi pola hidup sehat merupakan strategi pencegahan melalui kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan strategi

penanggulangan dengan fokus pada upaya pencapaian standar pelayanan minimal. Strategi ini diharapkan dapat menangani dengan akurat realitas masalah kesehatan yang spesifik di Kabupaten Jayapura yakni masalah kesehatan yang tercakup dalam standar pelayanan minimal serta masalah spesifik lainnya seperti penyakit malaria, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, hipertensi, diabetes melitus, tubercolosis, gangguan jiwa berat dan HIV/AIDS serta pengelolaan potensi obat asli.

3.3 Program dan Kegiatan

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023-2026, prioritas pembangunan kesehatan nasional yang tercantum pada Renstra Kementerian Kesehatan RI dan dan prioritas pembangunan kesehatan Provinsi yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua, selain itu memperhatikan isu strategis dan potensi masalah bidang kesehatan yang menonjol terjadi di Kabupaten Jayapura dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Program dan kegiatan yang disusun juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, terutama pada strategi pengembangan kawasan peruntukan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan. Berikut gambaran keterhubungan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Jayapura :

1. Peningkatan pelayanan Kesehatan dasar
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat
3. Peningkatan pelayanan Kesehatan dasar khusus OAP

Perumusan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada tahun 2023 mengacu pada RKPD tahun 2023. Maka dapat dirumuskan bahwa program 2023-2026 merupakan kelanjutan, pengembangan, penggabungan perbaikan maupun perumusan program baru/inovasi dari program yang telah dilaksanakan. Program pada masa 2023-2026 merupakan program prioritas bidang kesehatan yang memiliki indicator kinerja dan target capaian kinerja serta dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatof ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan terutama yang mendukung pencapaian Visi, misi tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Jayapura

Dalam mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan daerah, maka ditetapkan dukungan program dan kegiatannya dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024

Misi 1	: Meningkatkan kualitas manusia						
Misi 7	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik						
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S1: Meningkatakan akses dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan Akses pelayanan Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Kampung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
							Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
							Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan
				Penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi petugas kesehatan di Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
				Penyediaan Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas dan jaringannya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Penyediaan Logistik Kesehatan untuk Puskesmas dan Jaringannya secara merata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat dan Vaksin
							Pengadaan Bahan Habis Pakai
							Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pemenuhan Operasional Puskesmas dan jaringannya agar dapat menjalankan pelayanan kesehatan sesuai standard	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pemeliharaan seluruh sarana, Prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standard	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan
							Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
				Penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk perlindungan kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Penyediaan Pelayanan Kesehatan berjalan ke wilayah sangat terpencil dan terisolir	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		S1: Meningkatakan akses dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pemenuhan pelayanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				Melaksanakan upaya pencegahan penyakit melalui surveilans dan kewaspadaan dini wabah serta imunisasi yang merata di seluruh wilayah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana
							Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
							Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah
				Menyediakan layanan kesehatan yang bermutu melalui puskesmas yang terakreditasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		S2: Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penggunaan sediaan farmasi	Mengawasi pelaksanaan fasilitas kesehatan penyedia sediaan farmasi dan alat kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)
			Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk-produk makanan dan minuman	Pengendalian dan peningkatan peran serta pengelola Tempat Pengelolaan Makanan, jasa boga, rumah makan serta depot air minum dalam menyediakan produk yang sehat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
			Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk-produk mindtri rumah tangga	Pengendalian dan peningkatan peran serta pengelola industri rumah tangga dalam menyediakan produk yang sehat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-miniman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
		S3: Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Kualitasnya	Penyediaan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai standard	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
				Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan SDMK
				Meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya agar sesuai standard layanan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota
		S4: Meningkatnya Kemandirian Masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Melaksanakan upaya pelayanan dalam meningkatkan kemandirian kaesehatan di masyarakat	Melaksanakan upaya-upaya promosi kesehatan di masyarakat dengan berbagai media	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Penguatan kesehatan lingkungan untuk Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan
				Menginventarisir dan mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis kearifan lokal di masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
			Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat melalui UKBM	Menyelenggarakan UKBM yang terpadu dan efektif berbasis masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
				Menyelenggarakan gerakan masyarakat hidup sehat untuk meningkatkan indeks keluarga sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		S5. Terselenggara Penanggulangan Stunting	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Gizi Masyarakat	Mencegah dan menangani stunting di masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Terpenuhinya standar pelayanan umum	S2: Terselengaranya Standard Pelayanan minimal Kesehatan	Pelaksanaan SPM Kesehatan diseluruh Wilayah	Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil sesuai standard	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				Menyediakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi balita sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat usia produktif sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat usia lanjut sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Melitus sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan jiwa berat
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderitaTuberkulosis sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita terinfeksi HIV sesuai standard			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
	Terpenuhinya standar pelayanan umum	S1. Terselenggaranya kinerja pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfataan ilmu pengetahuan dan teknologi	Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan di bidang kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
				optimalisasi sistem informasi kesehatan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			Pemenuhan layanan administrasi perkantoran dengan efisian	Menlaksanakan fungsi manajemen perencanaan pembangunan kesehatan yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
							Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memenuhi standard	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
							Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				menyediakan Logistik dan peralatan kerja sesuai standard dalam pelayanan administrasi perkantoran		Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
							Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU
				Memperkuat pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara berjenjang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Pemenuhan layanan administrasi keuangan dengan efisien dan akuntabel	Melaksanakan fungsi manajemen keuangan yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
			Mengendalikan pengelolaan Aset daerah sesuai staandard	Melaksanakan manajemen pengelolaan barang milik daerah dengan efisien dan transparan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Pemenuhan administrasi kepegawaian yang efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
							Pemulangan Pegawai yang Pensiun
							dalam Melaksanakan Tugas
				meningkatkan Prestasi Kinerja ASN melalui SKP Kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Meningkatkan kompetensi Pejabat struktural pada Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Melaksanakan penyusunan peraturan perundangan-udangan serta penguatan pelaksanaannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Jayapura

Mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Revisi RPD Kabupaten Jayapura tahun 2023 – 2026, Sebagai dokumen perencanaan pada tahun antara RPD, pada pelaksanaannya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana kerja tahunan (Renja PD) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan alokasi dana PD pertahun. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan PD diawali dengan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten dimana masukan perencanaan dari tingkat Distrik dan Kampung dapat diakomodir dan diselaraskan dengan perencanaan dari masing-masing PD serta Pagu Alokasi anggran dari BAPPEDA Kabupaten dan selanjutnya dihasilkan rumusan Dokumen Renja PD tahunan.

Dokumen rencana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2023 memuat informasi tentang : sasaran yang dicapai selama Tahun 2021, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Terdapat penyesuaian oleh karena telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga merubah Jenis program dan kegiatan yang sejak 2018 s.d 2020 menggunakan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dilakukan Mapping pelaksanaan program dan kegiatan sektor kesehatan sebagaimana terdapat dalam lampirannya.

Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

1. Sasaran

   Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Yaitu sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2023 beserta indikator dan rencana tingkat capaian (targetnya). Dalam Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kab. Jayapura mengacu

pada 20 sasaran strategis Kesehatan Renstra DInas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategic dan yang akan mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2022 merencanakan kinerja dalam 5 Program Kesehatan sesuai Permendagri 86/2017 yaitu :

NO	PROGRAM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yaitu tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Pada Rencana Kerja 2023 menetapkan 65 Kegiatan baik di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. (secara rinci terlampir).

4. Indikator kinerja kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya

b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan
c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Pada RPD 2023-2026 dan SPM Kesehatan.

Rencana kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam matriks rencana kinerja tahunan (RKT) memuat seluruh kegaitan, *selengkapnya pada Lampiran.*

Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:

a. Dalam kaitannya dengan indikator SDG's, Dinas Kesehatan Kab. Jayapura akan terus memfokuskan kinerja dalam menurunkan angka kematian anak, meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil, dan penanggulangan penyakit AIDS,malaria serta penyakit lainnya.
b. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang SPM Kesehatan Dinas Kesehatan kab. Jayapura, maka perumusan program dan kegiatan tahun 2023 sebesarnya-besarnya dalam pemenuhan target cakupan SPM Nasional Permenkes 4/2019, dan Program Prioritas Nasional.
c. Penanganan Pandemi Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid 19 sebagai upaya prioritas tahun 2023
d. Kabupaten Jayapura masih memiliki kampung-kampung yang belum dilayani secara menyeluruh oleh sektor kesehatan oleh karena beberapa faktor seperti keterbatasan SDM kesehatan serta infrastruktur yang terbatas. Namun dengan pendekatan program/kegiatan Layanan dokter Mobile/Terbang maka diharapkan kampung – kampung terisolir layanan kesehatan dapat dijangkau oleh petugas secara komprehensif sehingga usia harapan hidup di kabupaten jayapura meningkat.
e. Berdasarkan amanat Gubernur papua yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Papua No.8 tahun 2014 dalam mengembangkan kesehatan masyarakat asli papua dan masyarakat papua umumnya, maka dengan Dana OTSUS, direncanakan program/kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat

dan meningkatkan keterlibatan masyarakat guna mencapai peningkatan erajat kesehatan yang mandiri.

f. Program stunting dengan target penurunan 1 % /tahun sesuai Peraturan Bupati
g. Akreditasi puskesmas dengan target 100 % telah terakreditasi
h. Jaminan Kesehatan Nasional

4.2 Pendanaan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan anggaran dalam pelaksanaannya. Dana yang ditetapkan sebagai pagu Dinas Kesehatan dan Puskesmas tahun anggaran 2024 adalah pagu tahun 2023 yaitu :

a. Sumber Dana PAD : Rp. 14.293.615.100
b. Sumber Dana OTSUS : Rp. 12.000.000.000
c. Sumber Dana DAK Penugasan : Rp. 8.399.423.000
d. Sumber Dana DAK Non Fisik : Rp. 32.738.854.000
e. Sumber Dana DAU : Rp. 41.246.782.652
f. Sumber Dana DAU Spesifik Grand : Rp. 41.914.484.000
g. Sumber Dana DBH Cukai : Rp. 4.521.548.000

Sehingga Total anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura (BL) adalah **Rp.155.114.706.752**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2024 yang telah disusun ini merupakan komitmen dari Kepala Dinas dan seluruh staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan.

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang kesehatan dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Jayapura. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Sebagai suatu Dinas di Kabupaten Jayapura yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kinerja pembangunan bidang kesehatan yang telah dibentuk ini diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi segala kegiatan yang dilakukan sehingga nantinya diharapkan agenda pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik.

Dalam kaitannya dengan anggaran, apabila ketersediaan anggaran berbeda dengan kebutuhan, maka akan dilakukan beberapa proses lanjutan perencanaan yaitu penetapan Rencana Kerja Anggaran yang memuat kegiatan prioritas masyarakat sesuai dengan juknis masing-masing sumber pembiayaan.

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jayapura Tahun Anggaran 2024 Aplikasi SIPD
2. URD OTSUS tahun 2024 Aplikasi PPR Provinsi Papua
3. Data Dasar DAK bidang Kesehatan tahun 2024
4. Rekapan Usulan Program/Kegiatan Distrik se-Kabupaten Jayapura hasil Musrenbang Kabupaten Jayapura
5. Indikator RPD Kab Jayapura 2023-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kab Jayapura 2023-2026
6. Rincian Sub Kegiatan pada Program dan kegiatan tahun anggaran 2024
7. Infografis Penanganan Covid 19 per 31 Desember 2022 di Kabupaten Jayapura

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

NO	Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun 2022)	TARGET	TAHUN 2024									Lokasi	PD Penanggung Jawab
													K	PAD	DAU	DBH	DAU DITENTUKAN	DAK PENUGASAN	DAK NON FISIK	OTSUS	BHP PROV	TOTAL		
1	**Terpenuhinya standar pelayanan umum**	S1. Terselenggaranya kinerja pemerintahan yang akuntabel							**Nilai Sakip OPD**															
									Rata-rata capaian Kinerja OPD		Persen														
									Rata-rata capaian SKP OPD		Persen														
			1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
			1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**														
			1	**02**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**X**	**%**												**165.073.700**	
			1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		85.630.900								85.630.900	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1								-		
			1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	6		29.589.000								29.589.000	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	1		49.853.800								49.853.800	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	**02**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**%**												-		
			1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	10.200	11.220		50.759.581.796								50.759.581.796	sentani	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
									Tersedianya TPP 2024													-		SIE KEUANGAN DAN ASET
									tersedia Insentif UKM													-		
			1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1			270.300.000							270.300.000	sentani	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
			1	**02**	**01**	**2,03**		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														-		
			1	**02**	**01**	**2,03**	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1		29.900.000							29.900.000	KAUREH, GRESI SELATAN, SENTANI, EBUNGFAUW, RAVENIRARA, KEMTUK GRESI	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
			1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			%											-		
			1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1		-							-	sentani	SUBAG KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
			1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1		-							-	sentani	SUBAG KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
			1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1									-	sentani	SUBAG KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
			1	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan		5		20.000.000							20.000.000	sentani	SUBAG KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
			1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	5										-	sentani	SUBAG KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

NO	Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun 2022)	TARGET	TAHUN 2024									Lokasi	PD Penanggung Jawab
													K	PAD	DAU	DBH	DAU DITENTUKAN	DAK PENUGASAN	DAK NON FISIK	OTSUS	BHP PROV	TOTAL		
										Jumlah PNS mengikuti PIM III dan IV		-	1									-	sentani	SUBAG KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
			1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	96	20		62.131.700							62.131.700	18 distrik	SUBAG KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
			1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Umum Perangkat Daerah		%										-		
			1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1		5.000.000							5.000.000	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit										-		
			1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang tersedia	Paket	1	1		21.439.149							21.439.149	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	1	1									-	sentani	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
			1	02	01	2,06	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1		34.670.000							34.670.000	sentani	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
			1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1		3.000.000							3.000.000	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1		34.909.400							34.909.400	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1		95.352.051							69.725.000	sentani	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
			1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD		%										-		
			1	02	01	2,07	01	**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1									-	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10									-	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1									-	sentani	YANKES FISIK
			1	02	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	12		-						-	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,08		Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah		%										-		
			1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1		-							-	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1		6.864.000							6.864.000	sentani	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
			1	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9		6.410.000							6.410.000	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%										-		
			1	02	01	2,09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	4									-	sentani	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
			1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4								-	sentani	SUBAG KEUANGAN DAN ASET
			1	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	paket	1	1		15.250.000							15.250.000	sentani	UMPROG DAN INFORMASI
2	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**S1: Meningkatakan akses dan kualitas layanan kesehatan**							**Indeks Kesehatan**													-		
									Angka Harapan Hidup		%											-		
									Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 KH		100.000 kh											-		
									Angka Kematian Bayi per 1000 KH		1000 kh											-		
									Prevalensi Stunting		%											-		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun 2022)	TARGET	TAHUN 2024								Lokasi	PD Penanggung Jawab
													K	PAD	DAU	DBH	DAU DITENTUKAN	DAK PENUGASAN	DAK NON FISIK	OTSUS	BHP PROV	TOTAL		
			1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar**		%											-		
			1	02	02	2,01		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan fasilitas Kesehatan di kampung													-		
			1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		Unit	-									-		
			1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	unit	1	2				240.280.000			1.800.000.000		2.040.280.000	Kampung Kamikaro, Aurina,	YANKES FISIK
			1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	unit	4	9				1.444.820.000			3.772.000.000		5.216.820.000	Sentani Barat (Mess). Namblong, Gresi Selatan, Airu dan Yokari	YANKES FISIK
			1	02	02	2,01	06	Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	PKM	10	10					3.050.000.000				3.050.000.000	Airu, Waibu, Pagai, Kemtuk, Demta, Sentani Kota	YANKES FISIK
										Jumlah Solar Cell di Pustu	Pustu		0				300.000.000					300.000.000	Malili	YANKES FISIK
										Jumlah Prasarana IFK	Unit		5					236.000.000				236.000.000	Sentani	
										Jumlah Ambulance							1.800.000.000					1.800.000.000	Pagai, Gresi Selatan	YANKES FISIK
			1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	1	1									-		
			1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit		1				1.190.000.000					1.190.000.000	Kampung Sp4	YANKES FISIK
			1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit		3									-		
			1	02	02	2,01	12	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	1					-					-		
			1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penurunan AKI dan AKB	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	22	20									-	15 distrik	SIE SDM DAN ALKES
									Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Sanitarian Kit dan spraycan			\						696.900.000				696.900.000	Gresi Selatan, Revenirara, Yokari, Waibu, Sentani	SIE SDM DAN ALKES
									Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Puskesmas dan Jaringan								1.110.000.000			1.214.000.000		2.324.000.000	Sawesuma, Santosa, Yokiwa, Yenggu Lama, Kautemung, Yadaw, Dormena, Muris Kecil, Naira, Aurina, Muara Nawa, Malili	SIE SDM DAN ALKES
									Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Gigi dan Mulut								300.000.000					300.000.000	Genyem, Sentani Kota	SIE SDM DAN ALKES
			1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	68	30						82.267.000			82.267.000	19 Distrik	SIE SDM DAN ALKES
			1	02	02	2,01	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Orang		56.600				-					-	19 distrik	SIE YANKES DASAR
			1	02	02	2,01	23	Pengadaan Obat, BHP, Bahan Medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Terlaksana Penyediaan Bahan Habis Pakai	Julmlah jenis bahan habis pakai untuk fasilitas kesehatan tersedia							5.100.000.000		99.075.600			5.199.075.600		
			1	02	02	2,01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket		1				350.000.000					350.000.000	19 distrik	SIE KEFARMASIAN
			1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat		%										-		
			1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1									-		SIE P2M
		S5. Terselenggara Penanggulangan Stunting	1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1						100.000.000			100.000.000	19 distrik	SIE KIA DAN GIZI
										Jumlah Dokumen pengelolaan stunting	Dokumen		1				179.616.450					179.616.450		SIE KIA DAN GIZI

NO	Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun 2022)	TARGET	TAHUN 2024								Lokasi	PD Penanggung Jawab
													K	PAD	DAU	DBH	DAU DITENTUKAN	DAK PENUGASAN	DAK NON FISIK	OTSUS	BHP PROV	TOTAL		
			1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1								-	19 distrik	SIE P2K2
			1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1			100.000.000		498.975.000			598.975.000	19 distrik	SIE P2K2
										Jumlah Dokumen Kab Kota Sehat						250.587.925					250.587.925		SIE P2K2
			1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1			200.000.000		302.720.000			502.720.000		SIE P2K2
			1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1								-	10 diSTRIK	SIEN YANKES DASAR
			1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1					413.606.000			413.606.000	19 distrik	SIE P2M
			1	02	02	2,02	22	Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan Napza	Terlaksana Pengelolaan kesehatan jiwa	Jumlah Dokumen pelayanan kesehatan kejiawaan masyarakqat	kampung		1					100.460.000			100.460.000	2 Distrik	SIE YANKES DASAR
			1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk kusta, dan frambusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1			200.000.000		1.243.210.270			1.443.210.270		SIE P2M
									Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk malaria												-		SIE P2M
			1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	8.092.905.121		8.000.000.000				8.277.917.775	24.370.822.896		SIE YANKES DASAR
			1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit (otensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	terlaksana pengambilan dan pengiriman sampel SHK ke Labkesmas	Julah sampel yang diperisa	Sampel		1					50.000.000			50.000.000		SIE YANKES DASAR
			1	02	02	2,02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dokumen	1	1			-					-		SIE YANKES RUJUKAN
			1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1			3.842.110.000					3.842.110.000	19 Distrik	SIE YANKES DASAR
									Junmlah Dokumen Operasional Kendaraan Lapangan	Junmlah Dokumen Operasional Kendaraan Lapangan						50.000.000					50.000.000		SIE YANKES DASAR
									Jmlh Petugas keamanan	Jmlh Petugas keamanan	50 orang					924.000.000					924.000.000		
								tersedianya operasional Kendaraan Lapngan dan Pajak kendaraan dan BBM,ATK								332.644.800					332.644.800		
			1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1			213.000.000		21.650.000			234.650.000	19 Distrik	SIE YANKES DASAR
									Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan PMI	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan PMI						100.000.000				300.000.000	400.000.000		
			1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di di Kabupaten/Kota	Unit	5	5			200.000.000		230.159.200			430.159.200	19 Distrik	SIE YANKES RUJUKAN
			1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1					99.740.000			99.740.000		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun 2022)	TARGET	TAHUN 2024								Lokasi	PD Penanggung Jawab
													K	PAD	DAU	DBH	DAU DITENTUKAN	DAK PENUGASAN	DAK NON FISIK	OTSUS	BHP PROV	TOTAL		
			1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1									-	19 Distrik	SIE P2M
			1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1			300.000.000					300.000.000	Waibu	SIE YANKES RUJUKAN
			1	02	02	2.02'	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1	1			816.706.700		1.834.291.958	1.500.000.000		4.150.998.658	19 Distrik	SIE P2M
			1	02	02	2,02	46	Pengelolaan Upaya Kesehatan ibu dan Anak	Tersedia pelayanan kesehatan Ibu dan anal	Jumlah Dokumen pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Dokumen		1					423.756.200			423.756.200		
			1	02	02	2,03		Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			Dokumen										-		
			1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1			512.463.965					512.463.965	Sentani	UMPROG DAN INFORMASI
			1	02	02	3.02'		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													-		
			1	02	02	3.02'	44	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Terklaksana pelayanan Manajemen Puskesmas	Junlah Dokumen hasil pelaksanaan manajemen puskesmas			1			512.985.600					512.985.600		
			1	02	02	3.02'	48	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daserah sangat terpencil bagi OAP, rumun tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daserah sangat terpencil bagi OAP, rumun tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daserah sangat terpencil bagi OAP, rumun tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen	1						480.000.000		480.000.000		
			1	02	02	3.02'	54	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	1	1								-	19 Distrik	SIE P2M
			1	02	02	3.02'	57	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1	1			100.000.000					100.000.000	19 Distrik	SIE P2M
																					-		SIE P2M
		S3: Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**													-		
			1	**02**	**03**	2,02		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota			Orang										-		
			1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes	Orang	140	225			3.713.700.000			2.984.000.000		6.697.700.000	19 Distrik	SIE SDM DAN ALKES
			1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1			100.000.000		266.189.000			366.189.000	19 Distrik	SIE SDM DAN ALKES
									Terlaksana pembinaan kepegawaian SDM Kesehatan								100.000.000					100.000.000		
			1	**02**	**03**	2,03		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Orang										-		
			1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	70	50					1.654.635.868			1.654.635.868	Sentani	SIE SDM DAN ALKES
			1	**02**	**03**	3.04'		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di			Orang										-		

NO	Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun 2022)	TARGET	TAHUN 2024									Lokasi	PD Penanggung Jawab
													K	PAD	DAU	DBH	DAU DITENTUKAN	DAK PENUGASAN	DAK NON FISIK	OTSUS	BHP PROV	TOTAL		
			1	02	03	3.04'	01	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang	-	225								-	Sentani	SIE YANKES DASAR
		S2: Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	1	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**													-		
			1	02	04	2,01		Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional													-		
			1	02	04	2,01	**01**	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	**1**	1							-	6 distrik	SIE P2K2
			1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga													-		
			1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1						192.275.000		192.275.000	Sentani	SIE P2K2
			1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													-		
			1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1									-		
			1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan													-		
			1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajajan dan sentra makanan jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	1								-		
			1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa										-		
			1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-miniman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	70							220.626.000		220.626.000		
		S4: Meningkatnya Kemandirian Masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	**1**	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**													-		
			1	**02**	**05**	2.01		Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat										-		
			1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1							283.571.000	283.571.000	19 diSTRIK	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Kondisi Awal (Capaian Kinerja Tahun 2022)	TARGET	TAHUN 2024									Lokasi	PD Penanggung Jawab
													K	PAD	DAU	DBH	DAU DITENTUKAN	DAK PENUGASAN	DAK NON FISIK	OTSUS	BHP PROV	TOTAL		
									Terlaksana program Badan peduli Kesehatan	pembinaan										150.000.000		150.000.000		SIE P2K2
			1	**02**	**05**	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													-		
			1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1				120.000.000				120.000.000	19 distrik	SIE P2K2
																						-		
3	**Terpenuhinya standar pelayanan umum**	**S2: Terselengaranya Standard Pelayanan minimal Kesehatan**							**Meningkatkan kualitas pemenuhan SPM**													-		
									Rata-rata capaian SPM urusan kesehatan		persen											-		
			1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat		%											-		
			1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.146	2.597									-	19 Distrik	SIE KIA DAN GIZI
			1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.986	3.613									-	19 Distrik	SIE KIA DAN GIZI
			1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.986	3.613					37.024.904			37.024.904	19 Distrik	SIE KIA DAN GIZI
			1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10.753	13.011								-	19 Distrik	SIE KIA DAN GIZI
			1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	17.300	20.933								-	19 Distrik	SIE KIA DAN GIZI
			1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	91.220	110.376								-	19 Distrik	SIE PTM
			1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	orang	5.002	6.052								-	19 Distrik	SIE KIA DAN GIZI
			1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.766	3.347				139.579.000				139.579.000	19 Distrik	SIE PTM
			1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.102	2.543				50.000.000	245.000.000			295.000.000	19 Distrik	SIE PTM
			1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	157	190							100.000.000	100.000.000	19 Distrik	SIE PTM
			1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	302	365				248.208.560	714.248.000			962.456.560	19 Distrik	SIE P2M
			1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	37.574	45.465				200.000.000	154.000.000			354.000.000	19 Distrik	SIE P2M
								TOTAL						8.092.905.121	51.259.581.796	270.300.000	33.340.703.000	3.982.900.000	8.983.910.000	12.000.000.000	8.861.488.775	126.766.161.641		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Jayapura Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : Dinas Kesehatan

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Kesehatan														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Airu, Kamikaru Kab. Jayapura, Airu, Aurina		Rp. 51.280.000	Rp. 1.989.000.000			Rp. 2.040.280.000	Rp. 3.600.000.000
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Kemtuk, Sama Kab. Jayapura, Kemtuk Gresi, Hatib Kab. Jayapura, Nambluong, Yokasib Kab. Jayapura, Gresi Selatan, Bangai		Rp. 37.900.000	Rp. 5.178.920.000			Rp. 5.216.820.000	Rp. 6.000.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Jayapura, Nimboran, Tabri Kab. Jayapura, Kaureh, Lapua Kab. Jayapura, Nambluong, Yokasib Kab. Jayapura, Yapsi, Ongan Jaya Kab. Jayapura, Airu, Kamikaru Kab. Jayapura, Airu, Aurina Kab. Jayapura, Gresi Selatan, Bangai		Rp. 3.050.000.000	Rp. 2.336.000.000			Rp. 5.386.000.000	Rp. 5.999.423.000
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Yapsi, Nawa Mukti		Rp. 7.960.000	Rp. 1.182.040.000			Rp. 1.190.000.000	Rp. 1.300.000.000
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 3.320.900.000			Rp. 3.320.900.000	Rp. 6.514.000.000
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.267.000				Rp. 82.267.000	Rp. 175.000.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.199.075.600				Rp. 5.199.075.600	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0					Rp. 150.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 378.379.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.024.904				Rp. 37.024.904	Rp. 369.600.000
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0					Rp. 958.249.784
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 139.579.000				Rp. 139.579.000	Rp. 50.500.000
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 295.000.000				Rp. 295.000.000	Rp. 228.690.600
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 441.800.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 962.456.560				Rp. 962.456.560	Rp. 1.770.114.500

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 354.000.000				Rp. 354.000.000	Rp. 1.029.591.000
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 279.616.450				Rp. 279.616.450	Rp. 3.135.358.459
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 849.562.925				Rp. 849.562.925	Rp. 1.329.232.000
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 502.720.000				Rp. 502.720.000	Rp. 150.000.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 413.606.000				Rp. 413.606.000	Rp. 621.295.000
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.460.000				Rp. 100.460.000	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.443.210.270				Rp. 1.443.210.270	Rp. 1.452.068.300
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.277.917.775				Rp. 16.277.917.775	Rp. 12.737.797.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.814.631.851				Rp. 3.814.631.851	Rp. 4.563.949.701
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 634.650.000				Rp. 634.650.000	Rp. 1.408.551.000
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 430.159.200				Rp. 430.159.200	Rp. 689.511.000
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 99.740.000				Rp. 99.740.000	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 277.057.600	Rp. 22.942.400			Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.150.998.658				Rp. 4.150.998.658	Rp. 3.221.350.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 423.756.200				Rp. 423.756.200	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi									
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 512.463.965				Rp. 512.463.965	Rp. 450.000.000
1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	02	3.02	0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 512.985.600				Rp. 512.985.600	
1	02	02	3.02	0048	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 480.000.000				Rp. 480.000.000	Rp. 471.475.400
1	02	02	3.02	0057	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.697.700.000				Rp. 6.697.700.000	Rp. 5.738.987.800
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 466.189.000				Rp. 466.189.000	Rp. 100.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.654.635.868				Rp. 1.654.635.868	Rp. 1.244.429.000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 192.275.000				Rp. 192.275.000	Rp. 150.000.000
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 220.626.000				Rp. 220.626.000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 433.571.000				Rp. 433.571.000	Rp. 225.000.000
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 120.000.000				Rp. 120.000.000	Rp. 844.050.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.630.900				Rp. 85.630.900	Rp. 101.911.700
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.589.000				Rp. 29.589.000	Rp. 29.589.000
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.853.800				Rp. 49.853.800	Rp. 44.654.046
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.759.581.796				Rp. 50.759.581.796	Rp. 61.830.399.752
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 270.300.000				Rp. 270.300.000	Rp. 650.000.000
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.900.000				Rp. 29.900.000	Rp. 50.000.000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	02	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.131.700				Rp. 62.131.700	Rp. 40.000.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.439.149				Rp. 21.439.149	Rp. 21.439.150
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0					Rp. 137.143.204
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.670.000				Rp. 34.670.000	Rp. 34.670.000
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.909.400				Rp. 34.909.400	Rp. 34.909.400
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 69.725.000				Rp. 69.725.000	Rp. 250.000.000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.864.000				Rp. 6.864.000	Rp. 7.080.000
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.410.000				Rp. 6.410.000	Rp. 6.410.000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0					Rp. 96.530.000
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0					Rp. 87.000.000
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.250.000				Rp. 15.250.000	Rp. 22.400.000
Jumlah									**Rp. 103.309.331.171**	**Rp. 14.029.802.400**			**Rp. 117.339.133.571**	**Rp. 131.320.538.796**

Kab. Jayapura,.....
Kepala Dinas Kesehatan

Khairul Lie, SKM, M.Kes
NIP. 196504171990031011

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Setelah adanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Batu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Batu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Numenklatur Struktur Organisasi.

2.2 . Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sektor kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, ditetapkan struktur organisasi melalui Peraturan Daerah yaitu :

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Daerah No.10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, dimana dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayapura, telah menggunakan struktur organisasi yang baru. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diperbaharui sesuai struktur yang ditetapkan.

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang OPD Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan terdiri dari:

a) Sekretariat;
b) Bidang Kesehatan Masyarakat;
c) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
d) Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
e) Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang antara lain :

1. Sekretariat Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; ii. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; dan

iv. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

a) Subbagian Umum, Program, dan Informasi Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

b) Subbagian Keuangan dan Aset Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

c) Subbagian Kepegawaian dan Hukum Tugas:

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi:

i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan

iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

b) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olah Raga Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
3. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari:

a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Surveilans dan Imunisasi Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi:

i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan

iv. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Fasyankes dan peningkatan Mutu Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

i. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

ii. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

iii. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Kefarmasian Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

b) Seksi Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tugas:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

6. UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memiliki 3 UPTD yaitu UPTD Intalasi Farmasi Kabupaten, UPTD Puskesmas dan UPTD PSC 119 Hasale Hokhosobo, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2018. Melaksanakan tugas teknis pelayanan kesehatan di Distrik sesuai petunjuk/pedoman/data informasi/Peraturan perundang-undangan antara lain:

- Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan
- Mengatur dan memberi petunjuk teknis penyelenggaraan program dan kegiatan pelayanan kesehatan
- Membina penyelenggaraan ketatausahaan pada Puskesmas
- Merencanakan pengembanganpelayanan kesehatan kepada masyarakat
- Mengkordinasikan tenaga teknis dan fungsional UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Membina kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan
- Mengendalikan dan mengevaluasi palaksanaan kegiatan pada UPTD

- Membagi tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada atasan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan memiliki Kelompok Jabaan Fungsional, yang saat ini terdiri dari 5 orang Administrator Kesehatan dan 1 orang Jabatan Fungsional pada program gizi masyarakat dan tersebar di Bidang-Bidang

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Perangkat Daerah

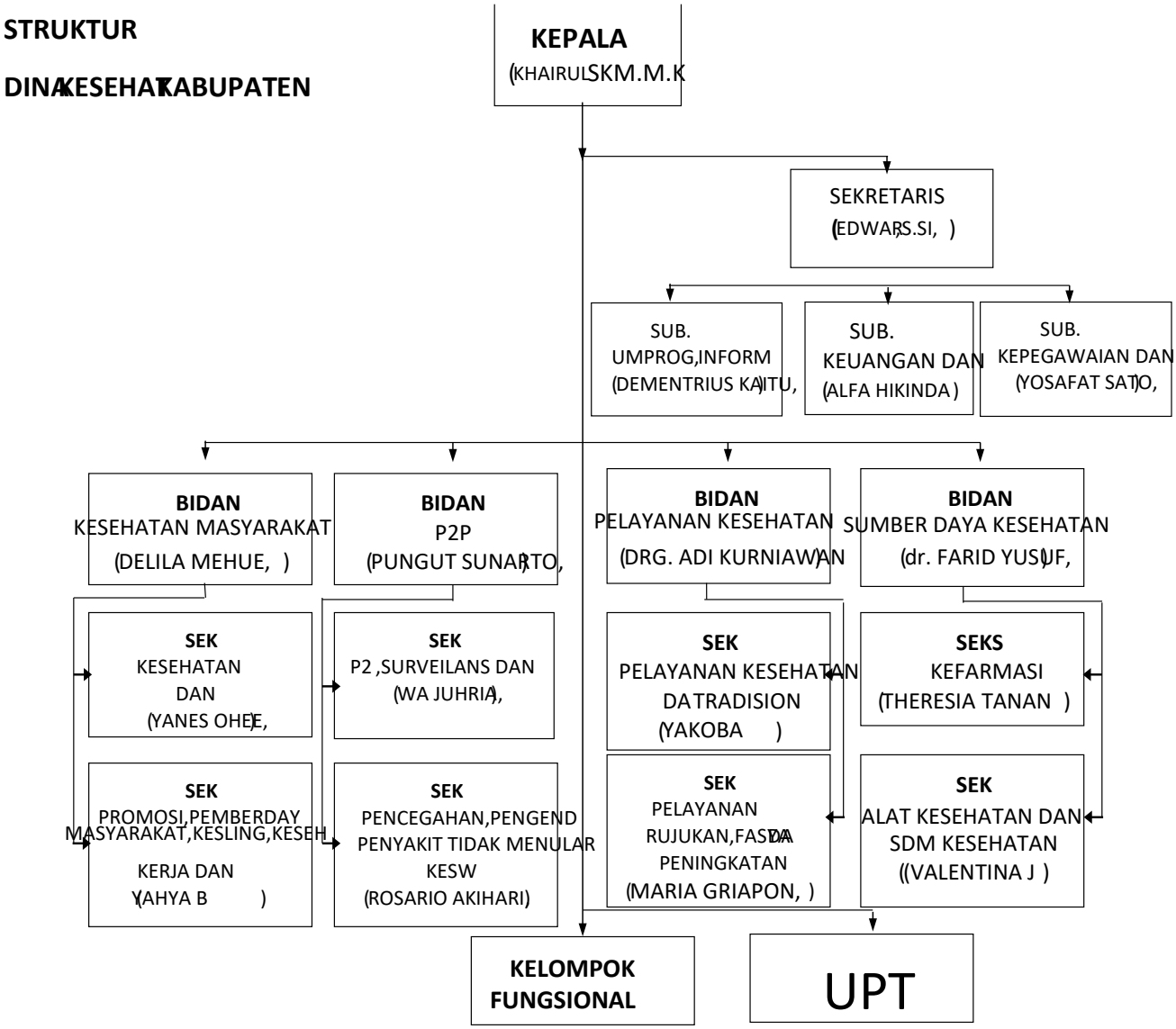

Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di setiap distrik. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas memiliki jaringan pelayanan antara lain :

a) Puskesmas Pembantu
b) Polindes
c) Pos Kesehatan Kampung
d) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
e) Posbindu
f) Poslansia

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Jayapura melalui sektor kesehatan dilakukan melalui Isu strategis Meningkatkan Kualitas manusia antara lain dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian Kinerja Tahun-					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022	2023	2024	2025	2026		
M1. Meningkatkan kualitas manusia	T1. Meningkatkan kualitas hidup manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70.97	71.25	71.84	71.70	72.10	72.50	72.50	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
		S1. Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	71.13	71.36	72.05	72.25	72.75	73.15	73.15	Dinas Pendidikan, Perpustakaan
		S2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	71.49	71.78	72.20	72.50	73.10	73.20	73.20	Dinas Kesehatan; Dinas PU; Dinas Pemukiman dan Perumahan
		S3. Meningkatnya daya beli masyarakat	• Pengeluaran perkapita	10,055	10,160	10,375	10,375	10,375	10,375	11,020	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi
			• Laju Inflasi	2.41	6.70	0.59	0.76	0.27*	1.02	1.02	
M2. Meningkatkan keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat	T2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat adat dan perkembangan kampung adat		• Persentase Wilayah adat suku yang memilki kejelasan peta hak ulayat	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	33.33	33.33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; Dinas Pertanahan dan Kawasan Pemukiman, Setda (bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat); Pemerintah Distrik
			• Indeks Desa Membangun	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah (Bidang Pmerintahan), Distrik
		S4. Meningkatnya peranan masyarakat adat dalam pembangunan daerah	Persentase Masyarakat hukum adat yang memiliki kejelasan struktur adat dan hak atas tanah	0.00	0.00	0.00	22.22	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; Dinas Pertanahan dan Kawasan Pemukiman, Setda (bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat); Pemerintah Distrik

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Sektor Kesehatan Memiliki Satu Tujuan yaitu meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya saing tenaga kerja dengan sasaran pembangunan Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam mencapai tujuan dan

sasaran tersebut, ditetapkan 30 Indikator Kinerja selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan sehingga hasil Indikator tersebut akan menggambarkan kualitas manusia yang meningkat.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *specific*, *measurable*, *achievable*, *reasonable*, *time-bond* (*SMART-C*).

Dalam mewujudkan sasaran RPD maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura guna mendukung tercapaianya harapan RPD antara lain :

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026 untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Tujuan 1 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan Kualitas Manusia yang tinggi

Sasaran 2 RPD Kab Jayapura : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		T1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	%	73.10	73.20	73.21	73.22	73.23	73.23	Dinas Kesehatan
			S1: Meningkatkan aksessibilitas pelayanan kesehatan dasar yang merata	Prosentase Fasilitas Kesehatan di Kampung/ kelurahan	78	80	82	85	87	90	90	Dinas Kesehatan
			S2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	66,9	67,0	67,3	67,7	67,9	68	68	Dinas Kesehatan
			S3: Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan UKBM di distrik	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S4: Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	81	83	85	87	89	91	91	Dinas Kesehatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Stunting	32	15	14	13	12	11	11	Dinas Kesehatan
			S6: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	95	97	98	99	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S7 : Terselenggara Pelayanan SPM Kesehatan	Prosentase Capaian SPM Kesehatan	72	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Tujuan 7 RPD Kab Jayapura : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran 3 RPD Kab Jayapura : Terpenuhinya standar pelayanan umum

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		T1: Terpenuhinya standar pelayanan umum		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	72	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
			S1. Terselenggara Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	C	C	B	B	B	B	B	Dinas Kesehtan

			S2: Terselenggara Pelayanan Administrasi Keuangan	Prosentase hasil pembinaan keuangan yang ditindaklanjuti	99	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehtan
			S3: Terselenggara Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata Capaian SKP ASN	82	85	87	89	91	93	93	Dinas Kesehtan

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahanperubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja adalah hasil kerja keras/perilaku berkarya/hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu unit organisasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat/ringkas dengan menggunakan variabelvariabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

3.2 Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/ lembaga/ Dinas/ Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu

program yang dilaksanakan suatu unit kerja. Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan program/ kegiatan tersebut.

3.3 **Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja**

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria "SMART" yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Specific, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. 2. Measurable, yaitu dapat diukur / dikuantifikasi secara obyektif. 3. Achieveable, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan. 4. Relevant, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur. 5. Time-Bound, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

3.4 **Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Batu, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kota yang mempunyai tugas membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan. Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kota Batu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut :

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2024

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Terdiri dari : Indeks Fertilitas, Indeks Morbiditas dan Indeks Mortalitas	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang P2P, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Angka Morbiditas, Fertilitas dan data Mortalitas di masyarakat
			$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$		
		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	Indeks Capaian SPM = Persentase **pencapaian mutu minimal layanan dasar** x Bobot Mutu (**20%**) + Persentase pencapaian **penerima layanan dasar** x Bobot Penerima layanan (**80%**)	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sekretariat	Dokumen Profil Kesehatan untuk data SPM Kesehatan

Mengetahui,

KEPALA DINAS,

Khairul Lie, SKM, M.Kes

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650417 199003 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN
Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani 99352

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 440/ /2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA,

Menimbang **:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama *(key perfomance indicators)* Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura ;

Mengingat **:** 1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494)

2’. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679)

3. Undang-Undang No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5607)
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Legara RI Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5887)
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20202024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura No. 35)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
13. Peraturan Bupati Jayapura No. 27 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023-2026**

KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura Tahun 2023 - 2026 sebagaimana terlampir;

KEDUA : IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENTANI
PADA TANGGAL : 25 Januari 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jayapura,

KHAIRUL LIE, SKM,.M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650417 199003 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Jayapura (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 440 / / TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPAEN JAYAPURA TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

PERIODE 2023-2026

1. Instansi :Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

2. Indikator Kinerja Utama:

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Terdiri dari : Indeks Fertilitas, Indeks Morbiditas dan Indeks Mortalitas	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang P2P, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Angka Morbiditas, Fertilitas dan data Mortalitas di masyarakat
			$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$		
		Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan	Indeks Capaian SPM = Persentase **pencapaian mutu minimal layanan dasar** x Bobot Mutu (**20%**) + Persentase pencapaian **penerima layanan dasar** x Bobot Penerima layanan (**80%**)	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sekretariat	Dokumen Profil Kesehatan untuk data SPM Kesehatan

DITETAPKAN DI : SENTANI
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jayapura,

KHAIRUL LIE, SKM,.M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650417 199003 1 011

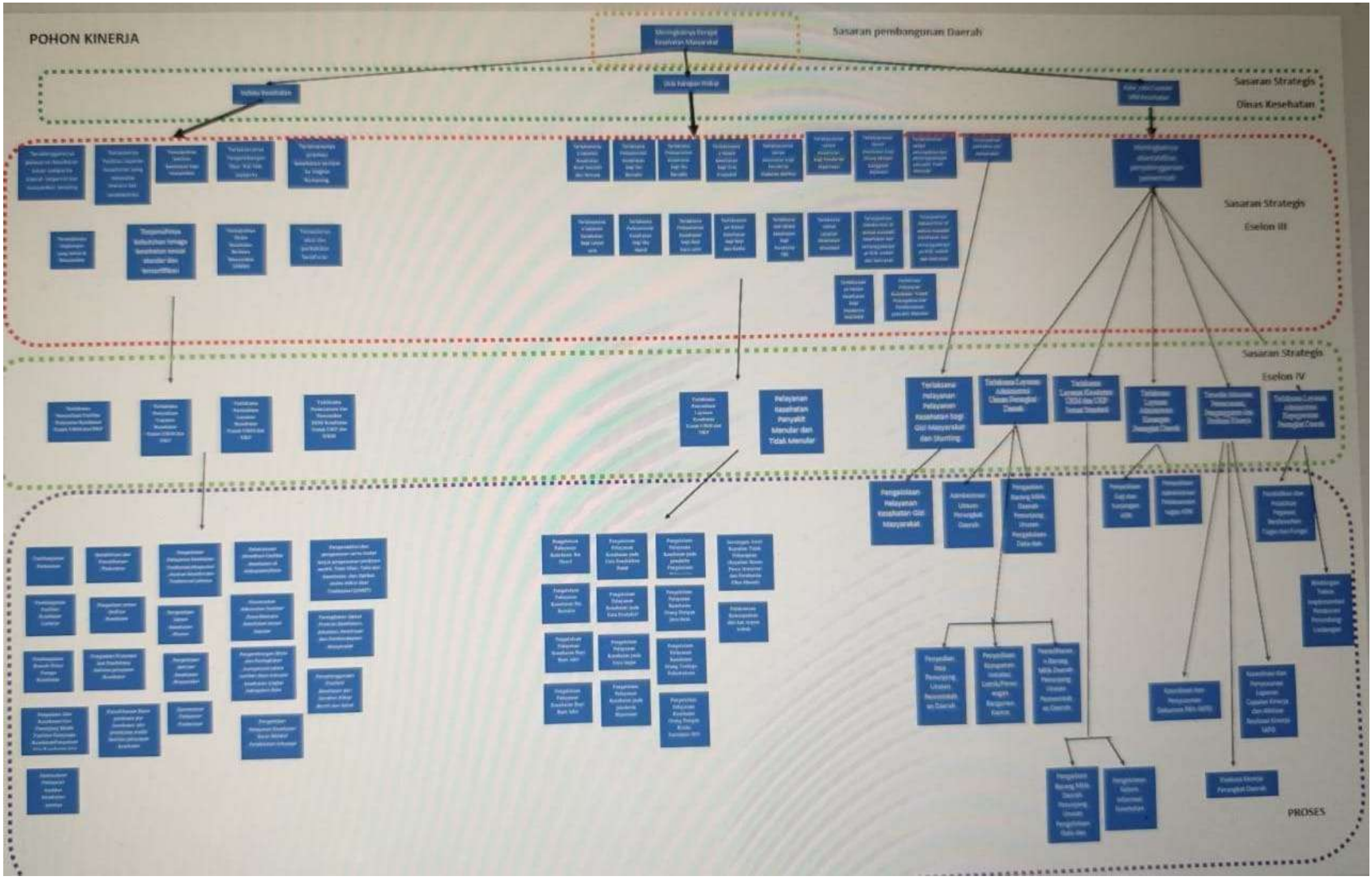
POHON KINERJA
Sasaran pembangunan Daerah
Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan
Sasaran Strategis
Eselon III
Sasaran Strategis
Eselon IV
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
PROSES

Perencanaan UPTD Puskesmas

Subbidang	Menu	Rincian	Komponen	Kinerja	Indikator	Satuan	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah					P A G U P U S K E S M A S																	TOTAL
							Kode	Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan																						
												AIRU	DEMTA	DEPAPRE	DOSAY	EBUNGFAUW	GENYEM	HARAPAN	KANDA	KEMTUK	LEREH	NAMBLONG	NIMBOKRANG	PAGAI	RAVENIRARA	SADUYAP	SAWOY	SENTANI	UNURUM GUAY	WAIBHU	YAPSI	YOKARI	KHOMBA	
PMT Lokal	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Persiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas	Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas	Terlaksananya Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan bakita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas	Jumlah Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan bakita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3.870.800	7.462.000	62.371.200	37.925.000	2.551.300	5.528.000	76.098.000	8.803.000	18.409.800	2.106.100	100.000	10.475.500	2.836.000	7.580.000	9.524.300,00	45.041.500	9.540.000	2.761.000	10.833.000	12.038.400	13.479.700	5.727.000	355.061.600
		Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang	Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita gizi kurang	Terlaksananya Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang	Jumlah bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	110.880.000	135.520.000	73.920.000	135.520.000	70.224.000	226.688.000	73.920.000	76.384.000	81.312.000	137.280.000	88.000.000	108.416.000	112.112.000	83.776.000	73.920.000,00	65.296.000	113.344.000	184.800.000	88.704.000	94.864.000	88.704.000	118.272.000	2.341.856.000
		Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang	Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK	Terlaksananya Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek	Jumlah bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	116.640.000	64.800.000	145.800.000	145.800.000	155.520.000	110.160.000	129.600.000	181.440.000	174.960.000	259.200.000	129.600.000	110.160.000	181.440.000	168.480.000	##########	145.800.000	291.600.000	162.000.000	162.000.000	123.120.000	110.160.000	294.840.000	3.486.240.000
UKM Esensial Primer	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Kunjungan lapangan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi	Terlaksananya Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi	Jumlah dokumen hasil Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	33.700.000	141.600.000	85.500.000	65.600.000	30.600.000	114.480.000	32.000.000	48.000.000	66.480.000	141.300.000	40.500.000	24.000.000	94.200.000	111.870.000	98.400.000,00	40.000.000	204.400.000	119.000.000	30.600.000	61.860.000	38.100.000	180.180.000	1.802.370.000
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu	Terlaksananya Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu	C Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	33.700.000	141.600.000	51.300.000	32.800.000	15.300.000	57.240.000	32.000.000	23.800.000	66.480.000	152.190.000	36.000.000	32.000.000	75.360.000	111.870.000	70.320.000,00	30.400.000	101.040.000	116.100.000	40.000.000	160.140.000	38.100.000	35.100.000	1.452.840.000
		Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita)	Pelaksanaan Kelas ibu hamil	Terlaksananya Kelas Ibu hamil	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu hamil	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	64.290.000	41.408.000	51.160.000	48.700.000	78.900.000	34.520.000	113.280.000	69.360.000	41.160.000	13.920.000	27.000.000	218.760.000	25.200.000	47.910.000	38.790.000,00	78.000.000	27.576.000	43.200.000	111.996.000	51.680.000	85.800.000	24.000.000	1.336.610.000
			Pelaksanaan Kelas ibu balita	Terlaksananya Kelas Ibu balita	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu balita	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	59.520.000	34.864.000	54.552.000	48.700.000	114.900.000	35.792.000	113.280.000	69.360.000	41.160.000	18.560.000	27.000.000	109.032.000	25.200.000	47.910.000	40.980.000,00	78.000.000	9.600.000	43.200.000	108.648.000	73.340.000	55.320.000	23.400.000	1.232.318.000
		Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Sekolah dan Remaja	Pembinaan Kesehatan Sekolah (termasuk skrining kesehatan) pada anak usia sekolah dan remaja	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Sekolah (termasuk skrining kesehatan) pada anak usia sekolah dan remaja	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pembinaan Kesehatan Sekolah (termasuk skrining kesehatan) pada anak usia sekolah dan remaja	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	33.920.000	38.000.000	17.100.000	82.000.000	15.300.000	57.680.000	79.200.000	9.200.000	39.960.000	30.140.000	40.000.000	28.950.000	18.840.000	13.520.000	50.800.000,00	48.000.000	37.600.000	25.750.000	87.600.000	41.550.000	29.200.000	144.000.000	968.310.000
		Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan	Terlaksananya Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan	Jumlah dokumen hasil kegiatan Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	8.807.000	6.160.000	23.276.000	38.290.000	4.390.000	5.990.000	13.510.000	20.240.000	-	2.820.000	42.120.000	4.964.900	14.190.000	4.960.000	9.110.000,00	10.400.000	45.020.000	9.600.000	7.489.000	16.930.000	4.169.000	1.113.000	293.548.900
			Pendampingan Pemberian MPASI Dan ASI Eksklusif	Terlaksananya Pendampingan Pemberian MPASI Dan ASI Eksklusif	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pendampingan Pemberian MPASI Dan ASI Eksklusif	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	26.960.000	23.600.000	17.100.000	-	15.300.000	8.400.000	6.600.000	6.800.000	-	20.880.000	13.500.000	-	9.420.000	4.970.000	23.520.000,00	12.000.000	7.120.000	23.800.000	6.400.000	8.600.000	25.400.000	18.000.000	278.370.000
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Terlaksananya Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	26.960.000	23.600.000	17.100.000	-	10.200.000	19.080.000	4.800.000	3.000.000	21.560.000	-	13.500.000	24.000.000	9.420.000	2.485.000	9.360.000,00	16.000.000	14.240.000	47.600.000	9.600.000	3.800.000	19.600.000	2.400.000	298.305.000
		Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Biaya Transport calon pendonor darah untuk mendukung P4K dari dan/ke UTD	Tersedianya Biaya Transport calon pendonor darah untuk mendukung P4K dari dan/ke UTD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembiayaan Transport calon pendonor darah untuk mendukung P4K dari dan/ke UTD	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokumen	10.000.000	4.500.000	-	-	15.300.000	-	-	4.571.000	-	12.000.000	-	-	-	700.000	2.000.000,00	8.000.000	4.720.000	8.620.000	-	1.700.000	-	-	72.111.000
			Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi	Jumlah dokumen hasil kegiatan Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13.600.000	12.320.000	27.276.000	6.690.000	23.380.000	8.896.000	9.413.000	16.418.000	7.331.000	1.060.000	13.500.000	15.710.000	12.600.000	3.325.000	10.918.000,00	3.750.000	12.688.000	9.600.000	8.825.000	21.500.000	34.530.000	3.513.000	276.843.000
		Surveilans Kesehatan Gizi dan KIA	Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	Terlaksananya Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	40.440.000	3.200.000	-	26.980.000	44.460.000	5.600.000	2.800.000	6.800.000	13.120.000	5.170.000	-	-	-	2.200.000	2.940.000,00	8.000.000	1.600.000	9.600.000	800.000	2.320.000	-	12.000.000	188.030.000
			Pertemuan validasi dan evaluasi data GIKIA	Terlaksananya Pertemuan validasi dan evaluasi data GIKIA	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pertemuan validasi dan evaluasi data GIKIA	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	3.486.000	10.035.000	28.972.000	-	10.200.000	16.500.000	10.600.000	5.580.000	10.860.000	18.000.000	25.902.000	21.600.000	9.180.000	9.604.000	8.848.000,00	35.000.000	9.050.000	72.600.000	9.328.000	43.800.000	15.404.000	6.939.000	381.488.000
		Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)	Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	Terlaksananya Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi,d pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi,d pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	33.700.000	26.640.000	27.276.000	16.265.000	15.000.000	7.720.000	32.800.000	17.529.000	-	13.920.000	13.500.000	21.600.000	14.310.000	68.064.000	33.060.000,00	38.400.000	10.800.000	-	20.880.000	20.880.000	19.600.000	35.100.000	487.044.000
			Pertemuan validasi dan evaluasi data usia produktif dan lansia	Terlaksananya Pertemuan validasi dan evaluasi data usia produktif dan lansia	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pertemuan validasi dan evaluasi data usia produktif dan lansia	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	3.750.000	9.900.000	1.454.000	6.292.000	21.930.000	4.178.000		-	-	-	2.234.000	21.600.000	2.306.000	4.404.000	10.976.000,00	12.000.000	5.920.000	-	-	40.150.000	8.980.000	7.980.000	164.054.000
	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Deteksi/penemuan dini/skrining faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas di masyarakat	Deteksi/penemuan dini/skrining faktor risiko dan penyakit tidak menular di masyarakat	Terlaksananya Deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular di masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan Deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular di masyarakat	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	16.220.000	141.600.000	78.600.000	24.600.000	7.650.000	38.160.000	109.800.000	84.300.000	47.350.000	20.880.000	21.750.000	21.600.000	56.520.000	36.160.000	37.640.000,00	78.000.000	57.280.000	28.800.000	27.000.000	100.645.000	58.800.000	64.000.000	1.157.355.000
			Pelaksanaan Follow Up Layanan Quitline Terintegrasi dengan Layanan UBM di FKTP	Terlaksananya Pelaksanaan Follow Up Layanan Quitline Terintegrasi dengan Layanan UBM di FKTP	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan Follow Up Layanan Quitline Terintegrasi dengan Layanan UBM di FKTP	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	8.220.000		17.100.000	32.800.000	15.300.000			1.200.000	-	-	13.500.000	-	9.420.000	22.845.000		8.000.000	41.400.000	4.800.000	27.000.000	-	9.800.000		211.385.000
		Pelayanan Imunisasi	Pelayanan Imunisasi (imunisasi bayi, baduta, WUS, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, crash program, imunisasi tambahan lainnya, skrining status imunisasi) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya	Terlaksananya Pelayanan Imunisasi (imunisasi bayi, baduta, WUS, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, crash program, imunisasi tambahan lainnya, skrining status imunisasi) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelayanan Imunisasi (imunisasi bayi, baduta, WUS, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, crash program, imunisasi tambahan lainnya, skrining status imunisasi) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	18.700.000	91.200.000	17.100.000	49.200.000	17.967.000	57.240.000	88.678.000	46.600.000	46.840.000	99.760.000	13.500.000	24.000.000	56.520.000	87.960.000	##########	72.800.000	114.240.000	51.600.000	33.400.000	64.960.000	93.600.000	96.000.000	1.348.965.000
			Pemantauan Kasus KIPI	Terlaksananya Pemantauan Kasus KIPI	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemantauan Kasus KIPI	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dokumen	17.250.000	3.800.000	17.100.000	16.400.000	1.275.000		1.400.000	1.700.000	4.840.000	13.340.000	13.500.000	6.000.000	9.420.000	13.440.000	870.000,00	1.600.000	2.000.000	4.200.000	5.800.000	1.300.000	2.740.000	600.000	138.575.000
		Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan penyakit menular, serta Program Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)	Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit Filariasis dan Kecacingan, dan pemantauan minum oralit dan Zink pada balita diare serta care seeking Pneumonia	Terlaksananya Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit Filariasis dan Kecacingan, dan pemantauan minum oralit dan Zink pada balita diare serta care seeking Pneumonia	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit Filariasis dan Kecacingan, dan pemantauan minum oralit dan Zink pada balita diare serta care seeking	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	18.700.000	7.600.000	17.100.000	13.120.000	14.700.000	15.440.000		8.400.000	25.930.000	5.800.000	13.500.000	8.000.000	9.420.000	4.970.000	8.360.000,00	10.400.000	12.640.000	7.100.000	30.900.000	17.290.000	9.800.000	14.400.000	273.570.000
		Penemuan kasus aktif penyakit menular	Penemuan kasus PD3I (AFP, campak rubela, dan PD3I lainnya)	Terlaksananya Penemuan kasus PD3I (AFP, campak rubela, dan PD3I lainnya)	Jumlah dokumen hasil kegiatan Penemuan kasus PD3I (AFP, campak rubela, dan PD3I lainnya)	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan	Orang	18.700.000		17.100.000	-	39.375.000	7.500.000	20.200.000	1.700.000	9.480.000	4.050.000	13.500.000	-	28.260.000	2.485.000	4.140.000,00	1.200.000	3.560.000	3.550.000	-	4.200.000	-	7.200.000	186.200.000
			Deteksi Dini HIV dan IMS	Terlaksananya Deteksi Dini HIV dan IMS	Jumlah dokumen hasil kegiatan Deteksi Dini HIV dan IMS	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pada populasi kunci	Terlaksananya Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pada populasi kunci	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pada populasi kunci	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	18.700.000	35.400.000	17.100.000	16.400.000	20.400.000	26.800.000	51.200.000	20.600.000	20.360.000	17.400.000	13.500.000	21.600.000	28.260.000	27.040.000	11.760.000,00	8.800.000	24.000.000	28.800.000	27.000.000	39.000.000	15.600.000	28.800.000	518.520.000
			Tracing Loss to Follow up (LTFU) dan pendampingan minum obat bagi ODHIV	Terlaksananya kegiatan Tracing Loss to Follow up (LTFU) dan pendampingan minum obat bagi ODHIV	Jumlah dokumen hasil kegiatan Tracing Loss to Follow up (LTFU) dan pendampingan minum obat bagi ODHIV	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) sesuai standar	Jumlah Orang orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	18.700.000	8.850.000	17.100.000	16.400.000	10.200.000	14.640.000	12.600.000	2.200.000	20.540.000	1.890.000	13.500.000	-	18.840.000	11.730.000	12.440.000,00	4.000.000	5.520.000	9.600.000	27.000.000	7.400.000	7.640.000	7.200.000	247.990.000

Perencanaan UPTD Puskesmas

Subbidang	Menu	Rincian	Komponen	Kinerja	Indikator	Satuan	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah					PAGU PUSKESMAS																		TOTAL
							Kode	Kabupaten/Kota	Kinerja	Indikator	Satuan	AIRU	DEMTA	DEPAPRE	DOSAY	EBUNGFAUM	GENYEM	HARAPAN	KANDA	KEMTUK	LEREH	NAMBLONG	NIMBOKRANG	PAGAI	RAVENIRARA	SADUYAP	SAWOY	SENTANI	UNURUM GUAY	WAIBHU	YAPSI	YOKARI	KHOMBA	
			Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat dan pemantauan ibu hamil reaktif HbsAg	Terlaksananya kegiatan Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat dan pemantauan ibu	Jumlah dokumen hasil kegiatan Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat dan pemantauan ibu	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	18.700.000		17.100.000	8.200.000	10.200.000	19.520.000		12.600.000	24.480.000	8.410.000	13.500.000	-	18.840.000	11.940.000	1.740.000,00	9.600.000	6.320.000	9.600.000	9.000.000	13.000.000	4.980.000	7.200.000	224.930.000
			Intensifikasi penemuan kasus Kusta Frambusia serta tatalaksana kontak kasus Kusta Frambusia	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi penemuan kasus Kusta Frambusia serta tatalaksana kontak kasus Kusta Frambusia	Jumlah dokumen hasil kegiatan Intensifikasi penemuan kasus Kusta Frambusia serta tatalaksana kontak kasus Kusta	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	14.960.000	2.950.000	17.100.000	16.400.000	10.200.000	19.520.000	5.600.000	7.600.000	15.850.000	5.800.000	13.500.000	-	18.840.000	7.455.000	5.880.000,00	3.600.000	14.240.000	9.600.000	9.000.000	13.000.000	9.960.000	7.200.000	228.255.000
		Penemuan kasus aktif TBC	Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC	Tersedianya Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC	Jumlah Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC	Orang	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	11.480.000	11.800.000	17.100.000	10.400.000	15.300.000	40.200.000	8.400.000	6.800.000	28.110.000	1.160.000	13.500.000	21.600.000	18.840.000	26.880.000	16.320.000,00	12.000.000	10.320.000	19.200.000	39.800.000	5.800.000	15.280.000	7.200.000	357.490.000
			Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir	Terlaksananya kegiatan Penemuan kasus aktif TBC	Jumlah Penemuan kasus aktif TBC	Orang	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	14.960.000	17.700.000	17.100.000	32.800.000	15.300.000	29.280.000	50.000.000	20.400.000	33.465.000	2.280.000	13.500.000	21.600.000	18.840.000	26.880.000	24.600.000,00	16.000.000	21.360.000	28.800.000	54.000.000	30.640.000	19.920.000	14.400.000	523.825.000
		Survei vector (DBD, Malaria dan Leptospirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN)	Pelepasliaran nyamuk Aedes ber Wolbachia	Terlaksananya kegiatan Pelepasliaran nyamuk Aedes ber Wolbachia	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelepasliaran nyamuk Aedes ber Wolbachia	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen				-				-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-
			Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoar Leptospirosis	Terlaksananya kegiatan Survei dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan kegiatan Survei dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	14.960.000	2.950.000		49.200.000	15.300.000	57.240.000	19.600.000	12.600.000	42.190.000	-	-	21.600.000	-	7.455.000	5.880.000,00	12.000.000	19.920.000	9.600.000	18.000.000	21.320.000	12.700.000		342.515.000
			Pengendalian vektor (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN)	Terlaksananya kegiatan Pengendalian vektor (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pengendalian vektor (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		5.900.000	8.550.000	10.720.000	10.710.000		11.200.000	78.000.000	-	5.700.000	13.500.000	21.600.000	9.420.000	7.455.000	8.160.000,00	12.000.000	4.000.000	4.800.000	9.000.000	6.520.000	4.900.000	4.800.000	236.935.000
			Inspeksi kesehatan lingkungan di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Tempat Fasilitas Umum (TFU), Sarana Air Minum (SAM), dan Fasyankes	Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes	Terlaksananya kegiatan Inpeksi kesehatan lingkungan di TPP (Tempat Pengelolaan Pangan), TFU (Tempat Fasilitas Umum), sarana air minum dan Fasyankes	Jumlah dokumen hasil kegiatan Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	13.800.000	1.600.000	6.550.000	24.600.000	10.200.000	26.220.000	29.800.000	22.800.000	2.420.000	2.280.000	13.500.000	21.600.000	4.710.000	9.940.000	9.360.000,00	10.000.000	12.000.000	9.600.000	9.000.000	11.300.000	12.700.000	4.800.000	268.780.000
			Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT)	Terlaksananya kegiatan Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT)	Jumlah dokumen hasil kegiatan Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT)	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	14.960.000	2.950.000	17.100.000	8.200.000	5.100.000	7.720.000		-	34.170.000	12.000.000	13.500.000	21.600.000	4.710.000	-	2.070.000,00	4.000.000	26.400.000	1.750.000	9.000.000	6.500.000	-	4.800.000	196.530.000
			Penyelidikan dan respon kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging	Terlaksananya kegiatan Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging	Jumlah dokumen hasil kegiatan Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	14.960.000		17.100.000	16.400.000	5.100.000				-	3.000.000	13.500.000	21.600.000	4.710.000	-	2.940.000,00	9.600.000	42.320.000	4.800.000	-	19.040.000	-	4.800.000	179.870.000
			Pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kader kesehatan dalam penanggulangan permasalahan P2P dan Penyehatan Lingkungan	Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan penyakit menular	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan penyakit menular	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan penyakit menular	Dokumen Laporan	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	23.050.000	2.950.000	17.100.000	-	10.200.000		7.000.000	35.408.000	30.205.000	2.000.000	13.500.000	22.100.000	14.130.000	9.940.000	7.220.000,00	8.400.000	18.812.800	4.800.000	4.160.000	3.500.000	-	2.400.000	236.875.800
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular	Dokumen Laporan	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	6.000.000	2.950.000	17.100.000	32.800.000	10.200.000			15.308.000	-	1.600.000	13.500.000	-	9.420.000	9.940.000	6.220.000,00	6.000.000	-	4.800.000	10.703.000	2.500.000	-	2.400.000	151.441.000
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan imunisasi dan surveilans PD3I	Dokumen Laporan	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	6.000.000		17.100.000	-	10.200.000			27.552.000	-	69.000.000	13.500.000	-	4.710.000	-	6.220.000,00	0	-	4.800.000	-	2.500.000	-	2.400.000	163.982.000
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk implementasi seluruh pilar STBM	Dokumen Laporan	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	24.447.800		17.100.000	2.460.000	15.300.000	3.448.000		19.300.000	12.604.200	-	13.500.000	-	18.840.000	9.940.000	7.660.000,00	400.000	-	4.800.000	15.440.000	2.500.000	6.640.000	2.400.000	176.780.000
			Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian keong dan hewan penular Schistosomiasis (Surveilans, penyemprotan, pemberian obat masal)	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian keong dan hewan penular Schistosomiasis (Surveilans, penyemprotan, pemberian obat masal)	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian keong dan hewan penular Schistosomiasis (Surveilans, penyemprotan, pemberian obat masal)	Dokumen Laporan	1.02.02.2.02. 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen				-				-	-	-	-	-	-	-	0		0	-	-	-	-	-	
Insentif Tenaga UKM Puskesmas	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	Terlaksananya kegiatan Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	Jumlah tenaga Puskesmas yang menerima Insentif dalam untuk melaksanakan kegiatan Program Upaya Kesehatan Masyakat (UKM) baik kegiatan di lapangan maupun kegiatan manajemen UKM	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	257.845.000	272.308.000	290.788.000	252.496.000	264.826.000	349.073.000	283.978.000	282.552.000	270.596.000	278.118.000	440.880.000	289.766.000	227.343.000	278.096.000	##########	293.956.000	321.831.000	324.176.000	232.132.000	324.365.000	293.956.000	268.615.000	6.335.268.000
Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM).	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM).	Terlaksananya kegiatan Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM).	Jumlah dokumen hasil kegiatan Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM).	Dokumen Laporan	1 02 02 02 02 0034	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen				-			26.772.000	0	-	-	-	-	-	-		0	27.420.000	-	26.952.000	-	-		81.144.000
Manajemen Puskesmas	Manajemen Puskesmas	Penguatan Integrasi Layanan Primer	Pendampingan pelaksanaan ILP di posyandu prima/pustu dan posyandu	Terlaksananya kegiatan Pendampingan pelaksanaan ILP di posyandu prima/pustu dan posyandu	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pendampingan pelaksanaan ILP di posyandu prima/pustu dan posyandu	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1.677.000	11.836.000	9.948.000	6.000.000	4.080.000	2.040.000	3.084.000	2.190.000	5.975.000	6.495.000	2.400.000	4.000.000	10.452.000	5.778.000	4.530.000,00	6.600.000	6.708.000	4.000.000	2.031.000	5.190.000	6.720.000	1.200.000	112.934.000
			Transport kunjungan rumah kader posyandu	Tersedianya Transport kunjungan rumah kader posyandu	Jumlah dokumen hasil kegiatan pemberian Transport kunjungan rumah kader posyandu	Dokumen Laporan	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	3.600.000	3.600.000	19.200.000	2.000.000	4.080.000	1.400.000	1.200.000	2.400.000	1.300.000	-	-	-	7.200.000	3.600.000	6.960.000,00	1.600.000	4.800.000	2.500.000	4.800.000	1.000.000	2.000.000	1.600.000	74.840.000
			Langganan SIMPUS	Terlaksananya kegiatan Langganan SIMPUS	Jumlah dokumen hasil kegiatan Langganan SIMPUS	Dokumen		SIK	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12.000.400	12.909.000	12.860.800	20.298.000	57.021.700	34.731.000	12.453.000	13.139.000	12.059.000	15.992.900	5.100.200	63.506.600	12.341.000	12.394.000	82.039.700,00	19.319.500	12.296.400	12.278.000	12.162.000	12.248.600	12.181.300	35.056.000	494.388.100
			Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK	Terlaksananya kegiatan penaedaan Paket Internet	Jumlah Paket Internet Puskesmas dan Pustu	Dokumen	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	6.000.000	-	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000,00	-	2.400.000		2.400.000	31.800.000	2.400.000	2.400.000	78.600.000
		Upaya penguatan perencana melalui Mini Lokakarya	Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	Terlaksananya kegiatan Upaya penguatan perencana melalui Mini Lokakarya bulanan	Jumlah dokumen hasil kegiatan Upaya penguatan perencana melalui Mini Lokakarya bulanan	Dokumen Laporan	2 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen	15.348.000	23.532.000	5.088.000	19.716.000	22.260.000	31.164.000	29.320.000	19.716.000	16.292.000	28.420.000	27.000.000	25.644.000	11.448.000	18.288.000	23.448.000,00	15.600.000	26.076.000	32.400.000	24.168.000	11.660.000	22.260.000	29.892.000	478.740.000
			Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	Terlaksananya kegiatan Upaya penguatan perencana melalui Mini Lokakarya triwulanan	Jumlah dokumen hasil kegiatan Upaya penguatan perencana melalui Mini Lokakarya triwulanan	Dokumen Laporan	3 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen	18.996.000	10.240.000	5.320.000	8.056.000	13.140.000	15.848.000	8.640.000	15.724.000	18.600.000	5.540.000	27.058.800	19.276.000	8.288.000	11.816.000	7.392.000,00	10.400.000	15.636.800	7.200.000	12.100.000	2.400.000	12.268.000	16.596.000	270.535.600
										Pagu input		##########	##########	##########	##########	1.281.440.000	##########	##########	##########	##########	##########	##########	1.410.361.000	##########	1.360.455.000	1.267.508.000	##########	##########	1.516.185.000	##########	##########	##########	##########	30.712.618.000
										Pagu Erenggar		##########	##########	##########	##########	1.281.440.000	##########	##########	##########	##########	##########	##########	1.392.361.000	##########	1.360.455.000	1.267.508.000	##########	##########	1516185000	1385651000	##########	##########	##########	30.694.618.000
										Selisih		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.000.000)
										JKN Kapitasi		78.915.085	243.555.773	297.739.831	300.654.888	180.389.136	315.146.432	521.347.987	363.589.811	251.452.233	208.354.814	177.912.715	344.622.803		87.732.246	71.093.976	301.625.335	##########	211.877.818	242.121.525	344.675.234	156.148.311	20.099.681	7.481.652.706
										JKN Non Kapitasi			53.888.400		48.215.200	13.238.280		70.761.395	14.300.000								27.200.000	226.999.600	50.000.940	28.353.600	89.600.000			611.252.415
										DAU SG		82.000.000	55.000.000	39.100.000	45.400.000	108.400.000	94.650.000	84.800.000	41.400.000	34.400.000	57.000.000	33.400.000	43.100.000	42.000.000	42.000.000	76.000.000	54.400.000	73.400.000	54.700.000	65.400.000	93.400.000	76.400.000	63.400.000	1.359.750.000
										TOTAL PAGU PUSKESMAS		##########	##########	##########	##########	1.583.467.416	##########	##########	##########	##########	##########	##########	1.780.083.803	##########	1.490.187.246	1.414.601.976	##########	##########	1.832.763.758	##########	##########	##########	##########	40.147.273.121

TABEL SINKRONISASI KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2024

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
	DINAS KESEHATAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	101.911.700	101.911.700				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.789.500	24.789.500				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.654.046	44.654.046				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	61.830.399.752	61.830.399.752				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	598.270.150	598.270.150				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.620.000	2.620.000	5.000.000	7.000.000		kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya						
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	112.500.000	112.500.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	44.610.000	38.110.000	3.000.000	3.500.000		kegiatan rutin Manajemen Kantor

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	20.000.000	20.000.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.588.000	113.588.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.376.500	36.376.500				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.532.000	161.532.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.439.150	21.439.150				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.765.000	112.765.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	34.670.000	34.670.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	3.000.000	3.000.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.909.400	34.909.400				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.079.554	288.079.554				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	500.000.000				Kendaraan Dinas Kantor
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel						
		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya						

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
		Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	425.000	425.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	7.080.000	7.080.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	6.410.000	6.410.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	96.530.000	96.530.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000	135.000.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.440.000	22.440.000				kegiatan rutin Manajemen Kantor
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
		Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas						
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.905.000.000			800.000.000	1.105.000.000	Pustu 2 Unit (Wajib ada Sertifikat tanah)
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	8.539.917.000		2.500.000.000	3.000.000.000	3.039.917.000	Mess dan Rumah Dinas Kopel
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5.000.000.000				5.000.000.000	Rehab Puskesmas dengan fasad Kemenkes
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000			500.000.000		Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	400.000.000			400.000.000		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
		Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan						
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	4.000.000.000	900.000.000	1.300.000.000	900.000.000	900.000.000	Ambulance dan Sumber Air bersih
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.070.000.000	510.000.000	240.000.000	720.000.000	600.000.000	Alat Kesehatan Pustu dan Puskesmas
		Pengadaan Obat dan Vaksin	Pengadaan Obat dan Vaksin	5.500.000.000	5.500.000.000				Obat Puskesmas dan Pustu
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.000.000.000	4.000.000.000				Bahan Habis Pakai Kesehatan Puskesmas dan Pustu
		Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	175.000.000	175.000.000				
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000	300.000.000				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	180.000.000	180.000.000				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	47.050.000	47.050.000				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.135.358.459	783.839.615	783.839.615	783.839.615	783.839.615	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	286.345.000	100.000.000		100.000.000	86.345.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	1.259.044.000	314.761.000	314.761.000	314.761.000	314.761.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150.000.000	150.000.000				Cetak Bahan promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10.900.000	10.900.000				Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	621.295.000	155.323.750	155.323.750	155.323.750	155.323.750	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	471.475.400				471.475.400	Mobile Klinik daerah sulit
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.326.531.500	331.632.875	331.632.875	331.632.875	331.632.875	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.741.809.941	3.935.452.485	3.935.452.485	3.935.452.485	3.935.452.485	Bantuan Iuran PBI Orang Asli Kab Jayapura
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000		25.000.000	25.000.000	50.000.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.684.318.000	1.171.079.500	1.171.079.500	1.171.079.500	1.171.079.500	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.508.551.000	377.137.750	377.137.750	377.137.750	377.137.750	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	889.511.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	289.511.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-					
		Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	417.100.000	104.275.000	104.275.000	104.275.000	104.275.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	200.000.000	200.000.000				Operasional dan Kegiatan PSC 119
		Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	3.196.150.000	799.037.500	799.037.500	799.037.500	799.037.500	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	567.365.000	141.841.250	141.841.250	141.841.250	141.841.250	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	1.807.450.000	451.862.500	451.862.500	451.862.500	451.862.500	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	220.000.000	220.000.000				Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.243.050.280	1.243.050.280				Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						
		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota						
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	9.309.698.280	9.309.698.280				Gaji Tenaga Kontrak serta insentif Dokter
		Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	100.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	1.244.429.000	1.244.429.000				Pelatihan Petugas Kesehatan bekerjasama dengan Bapelkes
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						
		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di	Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di						
		Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	34.606.440	34.606.440				Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kontrak

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
		Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional	Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional						
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	139.100.000	50.000.000		60.000.000	29.100.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga						
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga	150.000.000	50.000.000	20.000.000	50.000.000	30.000.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajajan dan sentra makanan jajanan	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajajan dan sentra makanan jajanan						
		Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga						
		Pemeriksaan Post market pada produk makanan-miniman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-miniman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						
		Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota						
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000	75.000.000				Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	614.050.000	153.512.500	153.512.500	153.512.500	153.512.500	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		PEMBIAYAAN SPM KESEHATAN							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.447.156.000	1.111.789.000	1.111.789.000	1.111.789.000	1.111.789.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU	DISTRIK/KAMPUNG				KETERANGAN / CATATAN
		RENSTRA	RENJA 2024		Wilayah Pembangunan 1	Wilayah Pembangunan 2	Wilayah Pembangunan 3	Wilayah Pembangunan 4	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.151.646.016	287.911.504	287.911.504	287.911.504	287.911.504	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	369.600.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.158.249.784	289.562.446	289.562.446	289.562.446	289.562.446	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	713.550.000	178.387.500	178.387.500	178.387.500	178.387.500	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.481.000.000	370.250.000	370.250.000	370.250.000	370.250.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	1.044.237.000	261.059.250	261.059.250	261.059.250	261.059.250	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	200.500.000	50.125.000	50.125.000	50.125.000	50.125.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	378.690.600	94.672.650	94.672.650	94.672.650	94.672.650	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	441.800.000	110.450.000	110.450.000	110.450.000	110.450.000	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.070.114.500	517.528.625	517.528.625	517.528.625	517.528.625	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.129.591.000	282.397.750	282.397.750	282.397.750	282.397.750	Kegiatan non fisik Puskesmas dan Dinas

USULAN RENCANA KERJA

PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM, DANA OTSUS YANG TELAH DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

KODEFIKASI					KLASIFIKASI BELANJA	NOMENKLATUR URUSAN PROV./KAB./ KOTA 050-5889		FISIK/ NON FISIK	OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI	LOKASI		TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK)	OPD PELAKSANA	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
							Kepmen 1317			Vol.	Sat.		DISTRIK	KAMPUNG/ KELURAHAN				
1	02	02	2	03	Belanja Kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		FISIK	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	2	unit	1.800.000.000	Distrik Aru	Kamikaro, Aurina,		Dinas Kesehatan	Februari-September	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun(Pustu) dengan 100% OAP
1	02	02	2	04	Belanja Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		FISIK	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	3	unit	3.772.000.000	Gresi selatan, Yokari, Sentani Barat	Bangai, kemtumelena, Dosay		Dinas Kesehatan	Februari-September	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun
1	02	02	2	14	Belanja Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		FISIK	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	Unit	1.214.000.000	Nimbokrang, Nimboran Sentani Timur, Demta,Unurum Guay, Kaureh,Depapre,Airu	Kaitemung, Yenggu Lama,Yokiwa, Muris Kecil,Sentosa, Sawesuma, Yadauw,Dormena,Aurina,Mali		Dinas Kesehatan	Februari-September	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan untuk pemenuhan pada Pustu di wilayah OAP
1	02	02	2.02	10	Belanja Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat		Non Fisik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40	Orang	100.000.000	9 Distrik			Dinas Kesehatan	Januari-Desember	Jumlah OAP yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1	02	02	2.02	23	Belanja Kesehatan	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.02.02.3.02.0048 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat didaerah sangat terpencil bagi OAP, Rumah Tunggu kelahiran, Pelayanan Telemedicine, dan pelayanan Kesehatan Lainnya	Non Fisik	Jumlah Dokemen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat didaerah sangat terpencil bagi OAP, Rumah Tunggu kelahiran, Pelayanan Telemedicine, dan pelayanan Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	480.000.000	Kaureh	Kamikaro, Aurina,Muara Pasra		Dinas Kesehatan	Juli-September	1. Melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, dan pelayanan kesehatan lainnya 2.Pelayanan kesehatan bergerak didaerah sulit dan sangat terpencil dengan menggunakan Helikopter 3.pelayanan dilakukan 0leh tenaga dokter,perawat, bidan, lab, kesling dan Gizi
1	02	02	2.02	51	Belanja Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	1.02.02.1.02.0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Non Fisik	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24000	orang	1.500.000.000	19 Distrik			Dinas Kesehatan	Januari-Desember	1.Menggunakan sub.kegiatan pada permendagri 106 karena blum ada dalam SIPD kepmen 050 2.Kegiatan ini membiayai kader malaria dan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan Malaria lannya dibiayai dari Dau SG dan DAK Non fisik. 3. Jumlah Kader Malaria yang diberikan Insentif adalah 250 x 12 x 500.000
1	02	03	2.02	02	Belanja Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Non Fisik	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	221	orang	2.984.000.000	19 Distrik			Dinas Kesehatan	Januari-Desember	Pemberian tambahan penghasilan dan apresiasi bagi nakes di wilayah 3 T kabupaten jayapura (45 dokter, 176 tenaga kesehatan)
1	02	05	2.02	01	Belanja Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Non Fisik	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen	150.000.000	10 Distrik	Waibu, Sentani Timur, Nimbokrang, Kaureh, Kemtuk, Nimboran, Kemtuk Gresi, Depapre, Unurum Guay, dan Yapsi		Dinas Kesehatan	Januari-Desember	Jumlah badan peduli kesehatan yang terbentuk untuk memantau pelayanan kesehatan terutama stunting
						JUMLAH						**12.000.000.000**						

KEPALA DINAS

KHAIRUL LIE, SKM, M.Kes

NIP : 19650417 199033 1 011

BERITA ACARA KESEPAKATAN
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK NONFISIK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024
PROVINSI : Papua
KABUPATEN / KOTA : Kab. Jayapura

Identitas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota :

Nama : KHAIRUL LIE, SKM., M.Kes
NIP : 196504171990031011
No HP : 081344393287
Email : ed_racikobat@yahoo.com

Identitas Peserta Desk :

Nama : Rusli A., SKM., M.Kes
NIP : 197405272000031006
No HP : 082199362020
Email : rusliaja57@gmail.com

No	Rincian Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan (Aktivitas)	Pagu Target Alokasi		Pagu Target Kesepakatan					
			Pagu Alokasi	Target Output	Pagu RKA	Target Output	Satuan	Komponen	Target	Satuan
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan penerbitan SPPIRT	192.387.000	60	192.275.000	70	Sarana	Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan ke pelaku usaha IRTP	80	Orang
								Pengawasan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen SPPIRT	70	Sarana
2	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pengawasan sarana IRTP	116.606.000	60	115.925.000	58	Sarana	Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	58	Sarana
								Bimbingan Teknis Penilaian mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku usaha	90	Orang
		Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga	103.908.000	28	104.701.000	30	Sampel	Pengawasan Iklan Pangan	12	Iklan
								Sampling dan Pengujian	30	Sampel
3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan	Pengawasan apotek toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	0	0	0	0	Sarana	Pengawasan sarana	0	Sarana
								Bimbingan teknis pendampingan regulasi	0	Orang
TOTAL			412.901.000	148	412.901.000	158			340	

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan BPOM telah menyepakati target output untuk setiap rincian kegiatan DAK NF BOK POM sesuai dengan pagu alokasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan informasi resmi dari BPOM terkait tata cara penggunaan DAK Non Fisik BOK POM TA 2024. Perencanaan dan implementasi pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab penuh Pemerintah Daerah.

Tiny Scanner

RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

DAERAH : Kab. Jayapura
JENIS : Penugasan
BIDANG : 02 - Kesehatan dan KB
SUB BIDANG : 02.02 - Penguatan Sistem Kesehatan

Pagu Alokasi (sub_bidang) : Rp. 8.083.100.000

A.KEGIATAN FISIK:

TIDAK.	MENU KEGIATAN	DETIL KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
					Volume	Satuan	
1.	02.02.02 - Penguatan Layanan Primer Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	02.02.02.02 - Prasarana	Penyedia	09979 - AIRU (Kecamatan , Desa) Komponen: 004 - IPAL 1 - Paket	1	Paket	Rp. 620.000.000
2.			Penyedia	09980 - PAGAI (Kecamatan , Desa) Komponen: 004 - IPAL 1 - Paket	1	Paket	Rp. 630.000.000
3.			Penyedia	09982 - KEMTUK (Kecamatan , Desa) Komponen: 001 - Udara Bersih 1 - Paket	1	Paket	Rp. 300.000.000
4.			Penyedia	09989 - DEMTA (Kecamatan , Desa) Komponen: 004 - IPAL 1 - Paket	1	Paket	Rp. 600.000.000
5.			Penyedia	09995 - SENTANI KOTA (Kecamatan , Desa) Komponen: 001 - Udara Bersih 1 - Paket	1	Paket	Rp. 300.000.000
6.			Penyedia	09998 - WAIBHU (Kecamatan , Desa) Komponen: 004 - IPAL 1 - Paket	1	Paket	Rp. 600.000.000
7.	02.02.03 - Peralatan Pengendalian Penyakit Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	02.02.03.01 - Semprotan	Penyedia	9403.230.014 - HINEKOMBE (Kecamatan SENTANI, Desa HINEKOMBE) Komponen:	10	Paket	Rp. 297.100.000

TIDAK.	MENU KEGIATAN	DETIL KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
					Volume	Satuan	
8.	02.02.06 - Penguatan Layanan Rujukan Pelaksana : RSUD Yowari	02.02.06.01 - Sarana	Penyedia	11495 - RS Umum Daerah Yowari Sentani (Kecamatan , Desa) Komponen: 002 - Pembangunan Gedung : 1 - Paket	1	Paket	Rp. 2.857.113.000
9.		02.02.06.03 - Alat Kesehatan	Penyedia	11495 - RS Umum Daerah Yowari Sentani (Kecamatan , Desa) Komponen: 001 - Ruang Rawat Jalan : 1 - Paket 004 - Ruang Laboratorium : 1 - Paket	1	Paket	Rp. 1.496.686.515
10.	02.02.08 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Pelaksana : Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	02.02.08.02 - Prasarana	Penyedia	9403.230 - SENTANI (Kecamatan SENTANI, Desa) Komponen: 002 - Perlengkapan Penunjang : 1 - Paket 003 - Perlengkapan Pengolahan Data : 1 - Paket 004 - Perlengkapan Pengaman : 1 - Paket	1	Paket	Rp. 186.000.000
11.		02.02.08.03 - Kendaraan Distribusi	Penyedia	9403.230 - SENTANI (Kecamatan SENTANI, Desa) Komponen: 001 - Kendaraan Roda 2 : 1 unit	1	Satuan	Rp. 50.000.000
Sub total tematik 00 - Bukan Tematik							Rp. 7.936.899.515
Total kebutuhan dana fisik							Rp. 7.936.899.515

B.KEGIATAN PENUNJANG:

TIDAK.	MENU KEGIATAN	DETIL KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
			Volume	Satuan	
1.	Kegiatan Penunjang	02.02.01100 - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) - Tematik 00	1	Orang Bulan	Rp. 142.887.000
Sub total tematik 00 - Bukan Tematik					Rp. 142.887.000
Total Kebutuhan Dana Penunjang					Rp. 142.887.000

Persetujuan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Detail Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan serta keterangan yang tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan fisik dan keuangan.

Disetujui Tanggal 28 November 2023

Pemerintah Daerah Kab. Jayapura KEMENTERIAN KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN seorang Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Ketua Tim Kerja Program DAK Fisik Bidang Kesehatan

KHAIRUL LIE, SKM., M.Kes

GIGIT. 19650417 199003 1 011

Handry Mulyawan

GIGIT. 198305162005021003

KETERANGAN:

1. Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tematik;
2. Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
3. Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: 1) Lelang/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; 3) E-Katalog/E-Pembelian;
4. Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll.
5. Keluaran Kegiatan diisi dengan volume/besaran dan satuan dari keluaran kegiatan;
6. Rincian Kegiatan Penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang telah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib)

LAMPIRAN

Belum ada lampiran

RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

DAERAH : Kab. Jayapura
JENIS : Penugasan
BIDANG : 02 - Kesehatan dan KB
SUB BIDANG : 02.01 - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting

Pagu Alokasi () : Rp.

A.KEGIATAN FISIK:

TIDAK.	MENU KEGIATAN	DETIL KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
					Volume	Satuan	
1.	02.01.01 - Pemenuhan Layanan Unggulan KIA Pelaksana :	02.01.01.01 - Alat Kesehatan	Penyedia	11495 - RS Umum Daerah Yowari Sentani (Kecamatan , Desa) Komponen: 004 - Set NICU Madya : Ventilator Non Invasif Bayi — 2 - Satuan 005 - Neonatus Portabel USG ECHO — 1 unit 006 - Letakkan AGD di samping tempat tidur — 1 unit 009 - Atur NICU Utama: Pantau Neonatus Invasif — 2 - Satuan	1	Paket	Rp. 2.502.906.100
2.	02.01.05 - Penyediaan Alat Pengawasan Gizi Pelaksana :	02.01.05.01 - Perlengkapan sanitasi	Penyedia	09984 - SADUYAP (Kecamatan , Desa) Komponen:	1	Perlengkapan	Rp. 99.950.000
3.			Penyedia	09990 - YOKARI (Kecamatan , Desa) Komponen:	1	Perlengkapan	Rp. 99.950.000
4.			Penyedia	09992 - REVENIRARA (Kecamatan , Desa) Komponen:	1	Perlengkapan	Rp. 99.950.000
5.			Penyedia	09998 - WAIBHU (Kecamatan , Desa) Komponen:	1	Perlengkapan	Rp. 99.950.000
Sub total tematik 00 - Bukan Tematik							Rp. 2.902.706.100
Total kebutuhan dana fisik							Rp. 2.902.706.100

B.KEGIATAN PENUNJANG:

TIDAK.	MENU KEGIATAN	DETIL KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
			Volume	Satuan	
Total Kebutuhan Dana Penunjang					Rp. 0

Persetujuan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Detail Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan serta keterangan yang tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan fisik dan keuangan.

Disetujui Tanggal ...

Pemerintah Daerah Kab. Jayapura	KEMENTERIAN KESEHATAN
(Jabatan)	(Jabatan)
(Nama Pejabat)	(Nama Pejabat)
GIGIT. (NIP Pejabat)	GIGIT. (NIP Pejabat)

KETERANGAN:

1. Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tematik;
2. Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
3. Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: 1) Lelang/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung; 3) E-Katalog/E-Pembelian;
4. Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll.
5. Keluaran Kegiatan diisi dengan volume/besaran dan satuan dari keluaran kegiatan;
6. Rincian Kegiatan Penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang telah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib)

LAMPIRAN

Belum ada lampiran

Jakarta, 12 November 2023

Mengetahui :

Unit Kerja	Nama	Paraf
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Dina Mariana, S.Si, Apt, M.P	
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Sandhy ED	
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Aritia, S.Si., Apt	
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Septi Hanna Dwisari, S.Farm, Apt	
Biro Perencanaan dan Keuangan	Saidah, S.Farm, Apt	

Peserta Desk

Nama : Rusli A., SKM., M.Kes
NIP : 197405272000031006

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN

Nama : KHAIRUL LIE, SKM., M.Kes
NIP : 196504171990031011

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Nama : Ali Muharam, SIP, MSE, MA
NIP : 19760103 200604 1 001

Tiny Scanner